

JURNAL

EDUCASI GURU : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN GURU

Diterbitkan Oleh:

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (PULPEN) NUSA TENGGARA



SUSUNAN REDAKSI

JURNAL EDUCASI GURU

ISSN : 2476-9495

Penganggung Jawab

Tasrif, M.Pd (Direkur Pulpen Nusatenggara)

Penyunting Ahli

Dr. Ruslan, M.Pd

Dr. Juwaidin, M.Pd

Dr. Mujakir, M.Pd

Penyunting Pelaksana

Syarifuddin, M.Pd

Ardi, M.Pd

Hafid, S.Pd

Suratman, M.Pd, Bi

Bendahara

Siti Nurbaya, M.Pd.

Alamat Redaksi

BTN Tolotonga Gg. Merpati No.14

Jatiwango Kota Bima

Jurnal Educasi Guru Lembaga Penelitian dan Pengembangan SDM Nusatenggara terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan bulan Oktober. Sebagai media informasi, pemikiran dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan dan Humaniora.

DAFTAR ISI

Hendra

**Hubungan Antara Efikasi Diri Dan Orientasi Akademik Dengan
Perilaku Menyontek Siswa 1 - 11**

Salahudin

**Improving School Organization Capacity in Responding Effectively to Changes
In External Contexts 12 - 21**

Ilham

**Partisipasi Stakeholder Terhadap Peningkatan Mutu Madrasah
22 - 38**

Dewi Sartika

**Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Model Skemp Disertai Diskusi
Kelompok Kecil Terhadap Prestasi Belajar Siswa 39 - 48**

Nurlailah

**Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Bani Umayyah
49 - 63**

Ikhsan

**Kontribusi Kebijakan Pimpinan, Kompetensi Dosen dan Pelayanan
Karyawan Terhadap Penjaminan Mutu Internal dan Dampaknya Terhadap
Kepuasan Mahasiswa 64 - 78**

Syarifuddin

**Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Make A Match* Dalam
Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa, 79 - 95**

HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DAN ORIENTASI AKADEMIK DENGAN PERILAKU MENYONTEK SISWA

Oleh: Hendra

(Dosen Tetap IAI Muhammadiyah Bima)

ABSTRAK

Perilaku menyontek dianggap menjadi hal yang biasa dikalangan siswa maupun mahasiswa, sehingga perlu untuk dicarikan solusi dan langkah pemecahan masalah dalam hal ini. Banyak faktor yang menyebabkan masalah ini, diantaranya adalah efikasi diri dan orientasi akademik siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dan orientasi akademik dengan perilaku menyontek siswa pada pelajaran matematika. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di siswa Kelas X SMA Negeri I Wonosari Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel sebanyak 111 siswa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, cara pengambilan sampel dengan menggunakan teknik random sampling.

Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 15.0 for windows. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan orientasi akademik dengan perilaku menyontek siswa. Hal ini dapat dilihat dari ketiga hasil uji hipotesisnya yaitu: (1). Ada Hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan orientasi akademik dengan perilaku menyontek siswa, hal ini ditunjukkan dengan nilai $F = 68,649$ dengan signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,05$). (2). Ada hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan perilaku menyontek siswa, hal ini ditunjukkan dengan nilai $r_{x1y} = 0,633$ dengan signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,05$). dan (3). Ada hubungan yang sangat signifikan antara orientasi akademik dengan perilaku menyontek, hal ini ditunjukkan dengan nilai $r_{x2y} = 0,741$ dengan signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,05$).

Kesimpulan: ada hubungan antara efikasi diri dan orientasi akademik dengan perilaku menyontek siswa SMA Negeri I Wonosari pada mata pelajaran matematika, baik secara parsial maupun bersama-sama.

Kata Kunci: Efikasi Diri, Orientasi Akademik, Perilaku Menyontek.

Pendahuluan

Kualitas moral sumber daya manusia masih menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini tidak pernah lepas dari kondisi, dimana sistem pendidikan tidak dijalankan secara proporsional. Sistem pendidikan di Indonesia yang menekankan pada aspek kognitif (mengandalkan kemampuan berpikir, hafalan, *drilling*) dan kurang melibatkan aspek afektif, emosi, sosial, dan spiritual dalam hal penilaian, menyebabkan siswa didik layaknya robot yang pasif, tidak ada inisiatif, tidak dapat berpikir kritis, apalagi untuk mencari solusi suatu permasalahan, sehingga mudah dipengaruhi dan diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang negatif, (Megawangi, 2005).

Perilaku Menyontek merupakan salah satu masalah moral yang terjadi dilingkungan pendidikan yang sering dan bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar sehari-hari, tetapi kurang mendapat pembahasan dalam wacana pendidikan kita di Indonesia. Kurangnya pembahasan mengenai "menyontek" mungkin disebabkan karena kebanyakan pakar pendidikan menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sifatnya sepele, padahal masalah menyontek sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat mendasar.

Beberapa dasawarsa terakhir, perilaku menyontek mendapat sorotan yang cukup tajam, seiring dengan terungkapnya beberapa kasus menyontek, seperti kasus terbaru yang masih hangat diperbincangkan adalah contek masal ujian nasional siswa-siswi sekolah dasar di Surabaya. Hal ini sungguh sangat disayangkan, sebab disaat yang sama para pelaku pendidikan dituntut untuk melaksanakan pendidikan karakter, namun masih saja ada kabar berita tentang praktik ketidakjujuran, kekerasan, pelecehan seksual didunia pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini jelas berdampak buruk pada citra dan tujuan pendidikan yang sesungguhnya, serta bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk memajukan usaha pendidikan, seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU Sisdiknas, 2003).

Perilaku menyontek dipandang sebagai salah satu bentuk perilaku ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) yang dapat ditemukan di sekolah-sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi

(Pujiatni & Lestari, 2010). Lebih lanjut, Petress (2003) perilaku menyontek dianalogikan dengan penyakit kanker pada tubuh. Agatha (Indarto & Masrun, 2004) menyebutnya sebagai penyakit. Maraknya praktek menyontek di sekolah menggambarkan kegagalan orang tua, guru, administrator, dan dewan pengurus sekolah dalam mempertahankan kewaspadaan dan bersikap proaktif terhadap kelakuan buruk siswa.

Secara umum, beberapa data terakhir yang mengungkap perilaku menyontek baik yang terjadi di tingkat internasional maupun nasional. Ditingkat internasional hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh *Josephson Institute of ethics* di Amerika pada tahun 2006 (Strom, 2007) dengan responden 36.000 siswa SMP, yakni menemukan 60% siswa pernah menerima dan mengakui mencontek pada saat ujian dan pengerjaan tugas, dan terjadi peningkatan sebesar 10% dalam kurun waktu 20 tahun, yakni 95% diantaranya mengaku bahwa tidak pernah ketahuan ketika mencontek. permasalahan ini dalam berbagai kajian dan penelitian perlu untuk segera mendapatkan penanganan.

Penelitian lain yang dilakukan McCabe dan Trevino (2001), dari 6000 responden mahasiswa di 31 Universitas Amerika, ditemukan sebanyak 67% responden mengaku telah menyontek sekurang-kurangnya sekali selama menempuh pendidikan.

Data diatas mengungkap fenomena menyontek di beberapa negara lain dibelahan dunia ini. Hal yang sama pun terjadi di bangsa ini, dimana perilaku menyontek bukan lagi menjadi hal yang tabu dan terlarang bagi siswa. Kata-kata "*Mendingan hasil kerja sendiri walaupun jelek, daripada nilai bagus tapi hasil menyontek*", sepertinya sudah kehilangan makna. hal ini didukung oleh hasil penelitian Hartanto (2011) yang menyatakan bahwa intensitas perilaku menyontek pada siswa SMP berada pada posisi sedang-tinggi (66,7%) sedangkan yang berada pada posisi rendah (33,3%) hal ini menunjukkan bahwa perilaku menyontek sudah menjamur didunia pendidikan dan harus segera mendapatkan penanganan.

Lebih lanjut, penelitian lain juga mengungkap tentang fenomena menyontek ini, yakni yang dilakukan oleh salah seorang siswa SMA favorit di Surabaya terhadap teman-teman di sekolahnya, dengan sampel 7% dari total seluruh siswa (lebih dari 1.400 siswa), menunjukkan bahwa 80% dari sampel pernah menyontek (52% sering dan 28% jarang), sedangkan medium yang paling banyak digunakan adalah teman (38%) dan meja tulis (26%), (Muslifah, 2008).

Ditingkat perguruan tinggi (universitas) lebih lanjut Tim Litbang Pabelan Pos melakukan penelitian tentang perilaku menyontek

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), hasilnya menunjukkan bahwa 25% tidak pernah menyontek, 26% jarang, 44% kadang-kadang, dan 5% selalu menyontek, sedangkan alasan dari mahasiswa yang menyontek adalah tidak belajar 23%, nilai sempurna 22%, tidak paham materi 50%, dan kebiasaan 5% (Nenden, 2010).

Beberapa data diatas menunjukkan bahwa perilaku menyontek telah menjamur dan bahkan sudah menjadi hal biasa dikalangan siswa maupun mahasiswa, sehingga perlu untuk dicarikan solusi dan langkah pemecahan masalah ini.

Pada umumnya, siswa memutuskan untuk menyontek karena malas belajar, takut mengalami kegagalan, tuntutan orang tua untuk memperoleh nilai yang baik atau peringkat kelas yang baik, Haryono, dkk (2001). Lebih lanjut, Dorongan untuk menyontek akan semakin kuat apabila seorang siswa memiliki efikasi diri yang rendah. Konstruk psikologi seperti efikasi diri memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku menyontek (Marsden & Neill, 2005). Hal ini diperkuat oleh beberapa penelitian, Nababan (2006), yang meneliti mengenai hubungan antara *self-efficacy* dengan frekuensi mencontek. Hasil penelitian menunjukkan, peningkatan *self-efficacy* dapat menurunkan frekuensi mencontek. Lebih lanjut Supardi (2010) meneliti mengenai keefektifan teknik *modelling* untuk meningkatkan *self-efficacy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menyontek disebabkan oleh *self-efficacy* yang rendah.

Bandura (1997) menyatakan keyakinan akan kemampuan diri seseorang mempengaruhi cara berpikir, perasaan, bagaimana memotivasi diri dan bagaimana harus bertindak. Lebih lanjut, Wood & Locke (Marsden & Neill, 2005) menyatakan bahwa efikasi diri lahir dari pengalaman dan keberhasilan terdahulu dan memiliki pengaruh pada tingkat prestasi, usaha, ketekunan dan bentuk-bentuk gagasan. Namun demikian perlu diingat bahwa efikasi diri bersifat spesifik dalam tugas dan situasi yang dihadapi. Seseorang dapat memiliki keyakinan diri yang tinggi pada suatu tugas tertentu, namun di situasi yang lain tidak seperti itu.

Papalia dkk (2009) menyatakan bahwa siswa yang memiliki efikasi diri tinggi, percaya bahwa mereka dapat menguasai tugas-tugas dan meregulasi cara belajar mereka sendiri, serta paling mungkin mencapai prestasi akademik yang baik di sekolah. Chemers dkk (dalam Elias, 2009) menyatakan bahwa tuntutan eksternal lingkungan dapat dilihat sebagai tantangan atau ancaman, individu dengan efikasi diri tinggi akan menganggap bahwa tugas-tugas tersebut sebagai tantangan dari pada sebagai ancaman.

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka siswa maupun mahasiswa dengan efikasi diri tinggi akan berusaha dengan optimal untuk meraih prestasi yang terbaik dengan cara yang positif, seperti tekun belajar. Efikasi diri yang tinggi akan mendorong siswa untuk terus berusaha mencapai hasil yang optimal meskipun banyak tantangan, serta menjadikan tantangan tersebut sebagai pacuan untuk terus berusaha. Sebaliknya, efikasi diri yang rendah akan membuat siswa menjadi tidak mau berusaha dengan optimal dan memilih untuk menghindari tugas-tugas yang menantang dan mencari jalan pintas untuk meraih prestasi seperti menyontek.

Siswa atau mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi akan terus berusaha dan menganggap tugas atau ujian adalah suatu kompetisi untuk menunjukkan kemampuan mereka yang tentunya akan mereka raih dengan usaha sendiri yang optimal meskipun menghadapi kesulitan dan tidak akan melakukan perilaku menyontek.

Selain faktor efikasi diri, faktor lain yang juga berpengaruh dalam perilaku menyontek adalah orientasi akademik (Marsden & Neill, 2005). Orientasi akademik adalah suatu pola keyakinan individu tentang tujuan perilaku yang menentukan bagaimana individu mendekati, melibatkan diri dan merespon terhadap situasi yang mendukung tercapainya prestasi, Ames (dalam Pintrich, dkk. 2010).

Secara umum, ada dua aspek orientasi akademik dalam kegiatan pembelajaran yaitu tujuan untuk mengembangkan kemampuan (*mastery goals*) dan tujuan untuk menunjukkan kemampuan (*performance goals*). Pintrich, dkk. (2010), menyatakan siswa yang berorientasi pada penguasaan (*mastery goals*) akan memfokuskan tujuannya pada pengembangan kemampuan, dan berusaha untuk memahami setiap tugas yang diberikan oleh para guru, dan selalu meningkatkan kompetensi diri. Sebaliknya, siswa yang berorientasi pada penunjukkan kemampuan (*performance goals*) lebih memfokuskan pada bagaimana orang lain menilai kemampuan yang dimilikinya.

Bila melihat kedua aspek orientasi akademik tersebut, *performance goals* lebih mengarah pada pola perilaku maladaptif daripada *mastery goals*. Hal ini ditunjukkan oleh Brown (2003) bahwa siswa yang berorientasi pada *performance goals* cenderung memperlihatkan ketidakberdayaan mereka, terutama pada saat mereka tidak mampu mengerjakan tugas akademis dengan baik. Siswa dengan orientasi ini (*performance goals*) sangat peduli terhadap penilaian orang lain atas hasil yang telah dicapai, maka mereka akan mencari solusi agar keadaan sebenarnya tidak diketahui oleh orang lain sehingga ada kemungkinan untuk melakukan menyontek, sebagai cara termudah untuk

mencapai tujuan. Hal ini, diperkuat oleh temuan penelitian Anderman dkk (1998) bahwa siswa yang menyontek menggambarkan diri mereka sebagai orang yang lebih berorientasi pada *performance goals*, sebaliknya siswa yang berorientasi pada *mastery goals* akan cenderung menghindari menyontek dalam mencapai tujuan pembelajarannya. lebih lanjut hal ini juga diperkuat oleh penelitian Indarto & Masrun (2004) yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara orientasi tujuan penguasaan dengan intensi menyontek, dan sebaliknya ada hubungan positif antara orientasi penguasaan dengan intensi menyontek.

Praktek menyontek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah praktek menyontek dalam pelajaran matematika di sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini sesuai dengan pendapatnya Schab (Anderman & Murdock, 2007) yang menemukan bahwa siswa lebih banyak menyontek dalam pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. hal inipun didukung oleh penelitian Rahardiani, dkk (2009) yang menyatakan ada hubungan *adversity intelligence* terhadap variabel intensi menyontek pada mata pelajaran matematika. Selain itu alasan peneliti mengambil tempat di SMA, hal ini dikarenakan praktek menyontek lebih banyak terjadi dilingkungan SMA (Anderman, dkk, 1998). Lebih lanjut, Pujiatni & Lestari (2010) yang menyatakan bahwa menyontek dimulai sejak duduk dibangku SMP dan SMA.

Stipek (2002) mengungkapkan bahwa selama masa remaja, sikap negatif terhadap mata pelajaran matematika mulai berkembang. Menurutnya, beberapa siswa sering mengalami kecemasan dalam belajar matematika. Hal ini dikarenakan beberapa siswa merasa kemampuannya tidak dapat berkembang dalam menerima pelajaran matematika. Matematika digambarkan sebagai sesuatu yang kompleks dan sering melibatkan pemberian tugas dan ulangan/ujian dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Lebih lanjut, Ketika siswa menyadari adanya konsekuensi kegagalan dalam pelajaran matematika, maka ada kemungkinan siswa tersebut cenderung akan menyontek agar terhindar dari kegagalan (Finn & Frone, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Hanisch di Austria (dalam Setya, 2005) hampir 94% siswa tahun pertama disekolah Menengah Pertama mengaku pernah menyontek pada saat pelajaran matematika. Lebih lanjut Anderman dan Midgley (dalam Hartanto, 2012) menyatakan bahwa perilaku menyontek dapat ditemukan pada siswa yang sedang mengalami masa transisi dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas.

Berdasarkan hasil pemaparan dan data empiris diatas, maka ada indikasi bahwa efikasi diri dan orientasi akademik siswa dapat

menjelaskan terjadinya perilaku menyontek disekolah. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Hubungan Antara Efikasi Diri dan Orientasi Akademik Dengan Perilaku Menyontek pada Siswa?".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X SMA Negeri I Wonosari Kabupaten Klaten, yang berjumlah 111, terbagi dalam 3 kelas, yakni dengan komposisi sebagai berikut: Kelas Xb berjumlah 40 siswa, kelas Xf berjumlah 40 siswa, dan kelas Xh berjumlah 39 siswa. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan random sampling sederhana (*Simple Random Sampling*), yaitu teknik pengambilan Sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi data efikasi diri, orientasi akademik dan perilaku menyontek siswa pada pelajaran matematika. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Instrumen pengumpulan data atau alat ukur dalam penelitian ini adalah menggunakan angket.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda melalui uji Uji Normalitas, Linearitas, Uji F, Uji Korelasi Parsial, Koefisien Determinasi (R^2), Uji Stepwise Regresi.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas. Hasil uji normalitas sebaran dari variabel perilaku menyontek diperoleh nilai Kolmogorov Smirnov ($KS-Z$) = 0,847; $p = 0,470$ ($p > 0,05$) hasil ini menunjukkan bahwa hasil sebaran data variabel perilaku menyontek memenuhi distribusi normal. Selanjutnya hasil uji normalitas sebaran dari variabel efikasi diri diperoleh nilai Kolmogorov Smirnov ($KS-Z$) = 0,593; $p = 0,874$ ($p > 0,05$) hasil ini menunjukkan bahwa hasil sebaran data variabel efikasi diri memenuhi distribusi normal, dan hasil uji normalitas sebaran dari variabel orientasi akademik diperoleh nilai Kolmogorov Smirnov ($KS-Z$) = 0,551; $p = 0,922$ ($p > 0,05$) hasil ini menunjukkan bahwa hasil sebaran data variabel efikasi diri memenuhi distribusi normal.

Uji Linearitas. Hasil uji linearitas hubungan antara variabel perilaku menyontek siswa dengan variabel efikasi diri diperoleh nilai $F = 78,891$; signifikansi (p) = 0,000; ($p < 0,05$) hasil ini menunjukkan bahwa

perilaku menyontek dan efikasi diri memiliki korelasi yang searah (linear). Selanjutnya untuk hasil uji linieritas hubungan antara perilaku menyontek dengan orientasi akademik diperoleh nilai $F = 126,540$; signifikansi (p) = 0,000; ($p < 0,05$) hasil ini menunjukkan bahwa perilaku menyontek dan orientasi akademik memiliki korelasi yang searah (linear).

Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, diperoleh nilai $F_{hitung} = 68,649$ dengan signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan koefisien korelasi signifikan secara statistik (tepat). Artinya terdapat korelasi/hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan orientasi akademik dengan perilaku menyontek siswa. maka penelitian ini menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa "tidak ada hubungan antara efikasi diri dan orientasi akademik serta secara bersama-sama tidak memberikan sumbangan yang signifikan pada perilaku menyontek siswa SMA dalam pelajaran matematika." Sebaliknya, ini berarti hipotesis alternatif (hipotesis pertama) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa "ada hubungan antara efikasi diri dan orientasi akademik dengan perilaku menyontek siswa SMA Negeri I Wonosari pada mata pelajaran matematika." diterima.

Uji Koefisien Determinasi. Berdasarkan perhitungan tabel analisis koefisien determinasi didapat nilai $R^2 = 0,560$ (56%). Hal ini menunjukkan bahwa peranan atau sumbangan efektif dari variabel efikasi diri dan orientasi akademik terhadap perilaku menyontek adalah sebesar 56%. Sedangkan sisanya 44% dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan perilaku menyontek siswa pada mata pelajaran matematika di luar variabel efikasi diri dan orientasi akademik. Misalnya kepercayaan diri, harga diri, konsep diri, kepatuhan pada kelompok, tuntutan nilai yang tinggi dari orang tua, pengaturan tempat duduk dan lain sebagainya.

Uji Korelasi Parsial. (1) Berdasarkan perhitungan tabel analisis koefisien korelasi antara efikasi diri dan perilaku menyontek siswa didapat nilai $r_{x1y} = 0,633$ dengan signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara efikasi diri dengan perilaku menyontek siswa. Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi "ada hubungan antara efikasi diri dengan perilaku menyontek siswa" diterima. (2) Analisis koefisien korelasi diatas antara orientasi akademik dan perilaku menyontek siswa didapat nilai $r_{x2y} = 0,741$ dengan signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara orientasi akademik dengan perilaku menyontek siswa. Hasil ini juga sekaligus

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi "ada hubungan antara orientasi akademik dengan perilaku menyontek siswa" diterima.

Analisis Stepwise (Regresi). (1) Berdasarkan hasil analisis stepwise, diketahui aspek efikasi diri yang paling tinggi korelasinya terhadap perilaku menyontek siswa pada pelajaran matematika yaitu aspek tingkatan (X_{1-2}), dengan nilai korelasi sebesar 0,614, dengan tingkat signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0.05$) dan mean empirik sebesar 29,00. Adapun yang paling rendah korelasinya terhadap perilaku menyontek siswa pada pelajaran matematika adalah aspek kekuatan (X_{1-1}), dengan nilai korelasi sebesar 0,530, dengan tingkat signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0.05$) dan mean empirik sebesar 33,59. (2) Berdasarkan hasil analisis stepwise, diketahui aspek orientasi akademik yang paling tinggi korelasinya terhadap perilaku menyontek siswa pada pelajaran matematika yaitu aspek orientasi penguasaan (X_{1-1}), dengan nilai korelasi sebesar 0,734, dengan tingkat signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0.05$) dan mean empirik sebesar 57,49. Adapun yang paling rendah korelasinya terhadap perilaku menyontek siswa pada pelajaran matematika adalah aspek orientasi performa (X_{1-2}), dengan nilai korelasi sebesar 0,603, dengan tingkat signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0.05$) dan mean empirik sebesar 27,97.

KESIMPULAN

Efikasi diri dan orientasi akademik memiliki hubungan yang signifikan dan memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap perilaku menyontek siswa di SMA Negeri 1 Wonosari pada pelajaran matematika, dengan nilai sumbangan efektif sebesar 56%. 2) Efikasi diri memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan perilaku menyontek siswa di SMA Negeri 1 Wonosari pada pelajaran matematika, dengan sumbangan efektif sebesar 0,633 atau 63,3%. 3) Orientasi akademik memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan perilaku menyontek siswa di SMA Negeri 1 Wonosari pada pelajaran matematika, dengan sumbangan efektif sebesar 0,741 atau 74,1%.

DAFTAR PUSTAKA

Anderman, E.M, dkk. (1998). Motivation and Cheating During Early Adolescence. *Journal of Educational Psychology University of Kentucky*, 90, 1, 84-93.

- Anderman, E.M. dan Murdock T.E. (2007). *The Psychology of Academic Cheating*. Boston: Elseiver.
- Bandura, A. (1997). *Self Efficacy The Excercise of Control*. New York: Freeman.
- Brown, Barbara, B. (2003). *Employees' Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors' Relation-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors*.
www.emeraldinsight.com/0953-4814.htm.
- Finn, K. V., & Frone, M. R. (2004). Academic Performance and Cheating: Moderating Role of School Identification and Self-Efficacy. *The Journal of Educational Research*; 97(3), 115-122.
- Hartanto, Dody, (2011). Penggunaan REBT untuk mereduksi perilaku menyontek pada siswa sekolah menengah. *Artikel Jurnal UAD*.
- Hartanto, Dody. (2012). *Bimbingan & Konseling Menyontek; Mengungkap Akar Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Indeks.
- Haryono, W., Hardjanta, G., dan Eriyani ,P. (2001). Perilaku Menyontek Ditinjau dari Persepsi terhadap Intensitas Kompetisi dalam Kelas dan Kebutuhan Berprestasi. *Psikodimensia. Kajian Imiah Psikologi*, 2, 1, 10-16.
- Indarto, Y., dan Masrun (2004). Hubungan antara orientasi penguasaan dan orientasi performansi dengan intense menyontek. *Psikodimensia. Jurnal Sosiosains UGM*,17 (3).
- Marsden, H., Carrol, M., dan Neill, J. T. (2005). Who Cheats at University? A Self-report of Dishonest Academic Behaviours in A Sample Of Australian University Students. *Australian Journal Of Psychology*, vol.57, no. 1, May 2005, 1-10. Australia: The Australian Psychological Society Ltd.
- McCabe, Treviño, dan Butterfield. (2001). *Cheating in Academic Institutions: A Decade of Research*. *Faculty of Management Rutgers University* : Lawrence Erlbaum Associates.

- Megawangi, Ratna. (2005). *Indonesia Merdeka, Manusia Indonesia Merdeka?*. <http://www.suarapembaruan.com>.
- Muslifah, A. Rachmawati. (2008). *Perilaku Menyontek Siswa Ditinjau dari Kecenderungan Locus of Control*. Skripsi. (Tidak Diterbitkan). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nenden. (2010). *Mahasiswa dan Kebiasaan Mencontek*. Lembaga Pers Mahasiswa (Pebelan Pos), UMS. Surakarta, Hlm 19, Edisi 87 Mei.
- Petress, K.C. (2003). "Academic Dishonesty: a Plaque on our Profession". *Journal of Education*. 123, 624-627.
- Pitrich, dkk (2010). *Motivation in Education; Theory, Research and Application*, Third Edision. New Jersey: Pearson Educational International, Inc.
- Pujiatni & Lestari. (2010). Studi Kualitatif Pengalaman Menyontek Pada Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Humaniora*,. Vol. 11, No. 2, 103-110.
- Rahardiani, N.M, Indarwati, E.S, & Sawitri, R.D., (2009) *The relation between adversity intelligence and intention of cheating in mathematics lessons at student of SMP negeri 2 and SMP PGRI 13 in Kendal Regency*, Artikel jurnal Undip.
- Santrock, J. W. (2009). *Psikologi Pendidikan. Edisi Tiga Buku 1* (Terjemahan oleh Diana Angelica). Jakarta: Salemba Humanika.
- Setya, Andarwanti R. (2005). *Sumbangan Orientasi Tujuan Siswa dan Struktur Tujuan Kelas Kepada Perilaku Menyontek Siswa SMP Dalam Pelajaran Matematika*. Thesis. (Tidak Diterbitkan). Depok: Universitas Indonesia.
- Stipek, D. (2002). *Motivation to Learn Integrating Theory an Practice*.Massachausetts: A. Person Education Company.

**IMPROVING SCHOOL ORGANIZATION CAPACITY IN
RESPONDING EFFECTIVELY TO CHANGES
IN EXTERNAL CONTEXTS**

Oleh :Salahuddin

(Guru SMPN 2 Wera- Kabupaten Bima)

Abstract

School organizations are now dealing with pressures from external contexts, particularly from stakeholders who are demanding schools to attain higher levels of scrutiny concerning the quality of education. It is seen as a fact that schools organizations especially in Indonesia fail to meet desirable standard for students' outcome. Moreover, such reality is coupled with the complaints from some parents that their children have poor literacy and numeracy skills. It is contended that the primary reason of those failures deals with teachers' motivation and work climate within the school. Therefore, school organizations need to improve their capacity. In other words, school organizations in Indonesia are encouraged to strategically take necessary steps so that the fundamental objectives of increasing students' achievements can be obtained. Providing adequate incentives to staffs would be the short-term objective to improve school organization capacity and changing current organizational culture by adopting the concept of learning organization would be the long-term objective. However, school organizations need to be consistent in implementing the frameworks so that the truly objective desired can be achieved.

Keyword : *Improving School, organization capacity, responding effectively, external contexts*

Introduction

In recent years schools organizations are facing great pressures from external contexts. School organizations, particularly Indonesian schools face the same challenge. The notion of competing with other schools and public enquiry to be accountable for the result of students' outcomes has pushed schools to improve their capacity. Indeed, parents, school boards members, and local government are now demanding that the school to attain higher levels of scrutiny concerning the quality of education. Parents are pressing school organizations to take the responsibility for educating their children. In particular, parents and community have compelling interest in ensuring at least basic student learning and show their effectiveness in creating desirable outcomes and actions

The presence of the above mentioned pressures are underpinned by the fact that students' achievement is below the national standard. This can be seen from the result of the national final examination where the average is still below the standard. Failing to meet standard is coupled with the complaints from some parents that their children have poor literacy and numeracy skills. It is contended that the primary reason of those failures deals with teachers' motivation and work climate within the school. Having observed such condition, teachers have low motivation which effect negatively to their job satisfaction and the work climate is unconducive where individual has no willingness to share knowledge and skills to each other. In fact, these circumstances have led to the poor attainment of the students.

Given the central importance of improving the organizational capability, school organizations in Indonesia are encouraged to strategically take necessary steps so that the fundamental objectives of increasing students' achievements can be obtained. In pursuit to improving school organization capacity, two frameworks from Shafritz, Ott & Jang (2005) are considered to be used as fundamental basis. The first is *The economy of Incentives* by Barnard (1938). Bernard's work is viewed as an important guideline in increasing job satisfaction of teaching and administrative staffs in schools. This framework can be used as a basis for a short-term goal in increasing students' outcomes. The second framework is *Changing organizational cultures* which is written by Trice and Beyer (1993). Trice and Beyer's framework is viewed as an essential and suitable standpoint in managing culture at schools. This is aiming at enhancing positive work climate within the

organization. Trice and Beyer's work will be planned as the basis for long term objective in improving students' achievement.

The importance of incentives

Barnard (1938 as cited in Shafritz, et al., 2005; Shafritz & Ott, 1996) states that the willingness of individuals in organization to contribute to organizations is yielded by incentives. He further argues that inadequate of providing incentives could effect negatively to the organization. It could be dissolution, changes of organizational objectives or failure of the organization. From this perspective, it is clear how important it is for leaders of organizations to provide sufficient incentives to their subordinates as it can increase job satisfaction. Indeed, the central issue of providing incentives is regardless with job satisfaction which has huge impact to organization. Many experts believe that maintaining and improving job satisfaction among the employees is very crucial for organizations. This occurs due to the reason that meeting employees' needs will likely lead to job satisfaction and thus results in profitability of the organization (Nankervis et al., 2005; Kimball & Nink, 2006). Employee's satisfaction has a direct impact on human resources (HR) costs and the effectiveness in achieving the organization's goals (Stone, 1998; 2005). The concept of job satisfaction can be contributed to the psychological well being of works (Paul & Robertson, 1976).

Nankervis et al. (2005) suggest that it is crucially important for leaders of any organization to have in-depth understanding about the issue of employee satisfaction. In this notion, School organization has to ensure to providing adequate incentives so that individuals at the school have high motivation to undertake their jobs. This is aiming at improving students' performance as it is believed that there is a positive correlation between teachers' performance and students' attainment. As Lavy (2002) reports that teachers' effort to raise students test score increase when incentives given.

Method of incentives

Barnard (1938 as cited in Shafritz, et al., 2005; Shafritz & Ott, 1992; 1996) proposes two types of incentives that School organization can offer to improve staff motivation. One of the types is *Specific inducement*. According to Barnard (1938 as cited in Shafritz, et al., 2005; Shafritz & Ott, 1992; 1996), specific inducement may consists of several classes. The first class is material such as money, things, or

physical conditions that are offered to individuals. This inducement may be refer to Hezberg's (1959 as cited in Daft, 2005) hygiene factor.

Hygiene factors relate to the environment in which a person works (Dubrin & Dalglish, 2003). The first component of hygiene factors is concerning with *payment or salary*; that is the sum of money received by an employee for a period of time (output produced). Henzberg (1959) in his study where he interviewed hundreds of workers about job satisfaction found that a low salary makes people dissatisfied. However, although those studies are true to certain extent, payment does not necessarily motivate the employee to be more productive (Dubrin & Dalglish, 2003).

Managers are suggested to improve *working conditions* as well. As Wright & Bonnet (2007) contend that '... most of us prefer work environment where is healthy'. Indeed, good and comfortable working condition may lead to employee satisfaction (Daft, 2005). This is what Barnard (1938 as cited in Shafritz, et al., 2005 and in Shafritz & Ott, 1996) meant by *Desirable physical condition*. He maintained that such an incentive is often essential unconscious, inducement to organization. Regardless of this perspective, School organizationis encouraged to try to create good working conditions. This can be done by providing all necessary media for teachers to help them easy in delivering the lessons.

Another important specific inducement is personal non-material opportunities. Barnard (1938 as cited in Shafritz, et al., 2005; Shafritz & Ott, 1992; 1996) maintains that in the development of all sorts of organizations this type of incentive is much more important than material rewards. This view is consistent with Hezberg (1959 as cited in Daft, 2005) assertions that to improve satisfaction and productivity, a manager or leader must acknowledge subordinates' achievement. In this notion Hezberg proposes to use motivator factors. These factors are related mostly to what people actually do in their work. Such things as a sense of achievement, recognition and responsibility are linked to performance. According to Herzberg (1959 as cited in Daft, 2005) when these opportunities are absent workers will not be satisfied nor perform well. Recognition and perceived organizational practices are the best predictors of overall job satisfaction and satisfaction with the organization (Leung, Sui & Spector, 2000).

Changing organizational cultures

Another strategy to improve school organization capacity is by changing organizational cultures. Most organizational experts nowadays recognize that organizational culture has a powerful effect on the performance and long-term effectiveness of organizations (Hartog & Verbug, 2004; Oggbona & Harris, 1998). Empirical research has produced an impressive finding demonstrating the importance of culture to in enhancing organizational performance (Cameron & Ettington, 1988; Denison, 1990; and Trice & Beyer, 1993). Having looked this perspective, it is crucially important that School organizationto alter the current unconducive working climates where individuals at the organization have no willingness to share knowledge and skills to each other. Therefore the school needs to setting up programs and encourage individuals at the school to learn together to achieve schools' objective. Sharing knowledge is fundamental aspects to increase organizational capacity (Nonaka, Toyama, & Byosiore , 2001; Sallins and Jones's, 2002; Iverson & McPhee, 2002; Swann, Scarbrough, & Robertson, 2002).

Intervening Learning Organization

A concept that has been increasingly favoured by many organizations worldwide to be implemented in improving organizational performance is Learning Organizations (LO). The interest of the concept grew considerably in 1990s as Senge's book *The Fifth Disciplines* sold over 650,000 copies (Zempke, 1999 in Burnes, Cooper & West, 2003). The notion of positive contributions of the concept to the organizations is the main reason why LO has remarkably attracted the organizations. Kiedeowski (2006), for example, reported that the job satisfaction and staff morale of employees in Division 123 at Bank ABC increased dramatically and thus the overall performance of the bank improved as well after intervening Senge LO.

Educational organizations are now trying to adopt LO. The concept of schools as learning organizations has evolved in response to the difficulties experienced in bringing about school reform (Silins, Mulford, & Zarins 2002). Many believe that being a learning organization is both realistic and desirable goal for schools and some people would be pessimistic about the contribution of LO due to some characteristics underpinned in the LO. Senge (2004) claims that there are

at least nine characteristics of learning organization (three most important ones will be elaborate in this paper).

Firstly, every individual in the organization is somehow stretching, growing, or enhancing his capacity to create. This characteristic is important in strengthening organizational knowledge base and encouraging creative ideas in schools which leads to better performance of the school (Brandt, 2003). Secondly, in learning organization people treat each other as colleagues. There is a mutual respect and trust in the way they talk each other, and work together no matter what positions may be (Senge, 2004). This characteristic creates positive climate in organization. In schools having this characteristic is important to be enhanced as supportive and respectful relationships either between the staff (teachers and others) or between the students will likely link to better performance of schools (Hayes, Christie, Mills & Lingard, 2004).

Thirdly, visions of the direction of the organization emerge from all levels. The responsible of the top person in the enterprise is to manage the process whereby new emerging visions become shared visions (Senge, 2006). This characteristic is different from the traditional model of organization applied in most Indonesian schools where all the vision are from and created by principal.

Empirical research, indeed, shows that there is a positive relationship between intervening the concept and school performances. Voulalas and Sharpe (2005) had explored some schools in the New South Wales, Australia that implemented the LO concept and they come up with the conclusion that intervening LO lead to the positive transformation of the studied schools. For this reason, it can be asserted that being learning organizations is realistic for school organization as it can be implemented and it is then desirable goal to the improve the schools' performance.

Dimensions of culture change

Changing organizational cultures by planning the above mentioned concept is not an easy task. Trice and Beyer (1993 as cited in Shafritz, et al., 2005; Shafritz & Ott, 1992; 1996) claim that "introducing something new and substantially different from what prevails in existing cultures, cultural innovation is bound to be more difficult than cultural

maintenance" (p. 383). As has been advocated, changing the way individuals to share ideas at School organization would be a difficult plan as it is categorised as revolutionary and comprehensive efforts to alter the cultures of the whole elements in the school. If this plan is viewed as continuous process, Trice and Beyer (1993 as cited in Shafritz, et al., 2005; Shafritz & Ott, 1992; 1996) propose four dimensions to better understand of the amount of change that school organization is taking on.

The first dimension is *the pervasiveness*. This dimension deals with the extent to the proportion of culture change affects the activities of an organization. This proportion depends on at least two factors: how many individuals are targeted to alter their cultural understanding and behaviours, and how often these changes are going to call upon them to behave differently in undertaking their job. In perceiving this dimension School organization needs to make sure that all individuals at the school are targeted to adopting the new behaviour -LO concept. The second dimension is the *magnitudes*. The notion of the distance between the old understanding and behaviours and the new ones that individuals in organization plan to adopt is the concern of this dimension (Trice and Beyer (1993 as cited in Shafritz, et al., 2005; Shafritz & Ott, 1996).

The third is *innovativeness*. This dimension refers to the degree to which new planned behaviour is unprecedented or has some similarity to what already existed somewhere. If other schools have already implemented LO concept, School organization can adapt and imitate the way they implement the concept. The last dimension is the *duration* which refers to how long a change effort is likely to occur and how permanent the change is going to be. To seek the result desired of implementing LO concept, school organization has to wait for a long time. However, since it is a long-term objective in increasing students' outcome the process of change may take a great amount of time.

Conclusion

In conclusion school organizations need to take necessary step in improving its capacity. The pressures coming from all parties to increase the school performance should be address properly. Two frameworks from Shafritz, Ott, & Jang offer promising solutions to tackle those pressures. Providing adequate incentives to staffs would be the short-term objective to improve School organization capacity and changing

current organizational culture by adopting the concept of learning organization would be the long-term objective.

However, school organizations need to be consistent in implementing the frameworks so that the truly objective desired can be achieved. Providing incentives to the staff will not only be in form of specific inducement such as material, personal non-material opportunities and desirable physical condition but also in form of general inducement such as the condition of communication. Regardless of planning for the culture change, it is crucially important to notice the dimensions of change so that the long term objective in improving the school capacity can be gained significantly.

References:

- Barnard, C. I. (1938). The economy of incentives. In Shafritz, J. M., Ott, J. S., & Jang, Y. S. (Eds.) (2005). *Classics of organizational theory* (6th ed.). Belmont: Thomson Wadsworth.
- Brandt, R. (2003). Is this school a learning organization? 10 ways to tell. *Journal of Staff Development*, 24(1), 1.
- Burnes, B., Cooper, C., West, P. (2003). Organizational learning: The new management paradigm?. *Management Decision*, 41(5/6), 452.
- Daft, R. L. (2005). *The leadership experience* (3rd ed). South-Western
- Dubrin, A. J. & Dalglish, C. (2003). *Leadership: An Australian focus*. Queensland: John Wiley & Sons Australia Ltd.
- Hayes, D., Christie, P., Mills, M., & Lingard, B. (2004). Productive leaders and productive leadership: Schools as learning organizations. *Educational Administration*, 42(4/5), 520.
- Irick, M. L. (2007). Managing Tacit knowledge in organizations. *Journal of Knowledge Management Practice*, 8(3).
- Iverson, J. O. & McPhee, R. D. (2002). Knowledge management in communities of practice. *Management Communication Quarterly*, 16(259).
- Kiedrowski, P. J. (2006). Quantitative assessment of Senge learning organization intervention. *The Learning Organization*, 13(4), 369-383.

- Kimball, E. S. & Nink, C. E. (2006). How to improve employee motivation, commitment, productivity, well-being and safety. *Correction Today*, 68 (3), 66.
- Kramar, R., McGraw, P. & Schuler, R.S. (1997). Human resource management
in Australia (3rd ed.). Longman.
- Lavy, V. (2002). Evaluating the effect of teachers' group performance incentives on pupil achievement. *The Journal of Political Economy*, 100(6).
- Leung, T., Siu, O., & Spector, P. (2000). Faculty Stresses, Job Satisfaction, and Psychological Distress Among University Teachers in Hong Kong: The Role of Locus of Control. *International Journal of Stress Management*, 6(3), 121-128.
- Nankervis, A. R., Compton, R., & Baird, M. (2005). *Human resource management* (5th ed). Victoria: Thomson.
- Nonaka, I., Toyama, R., & Byosiore, P. (2001). A theory of organizational knowledge creation: Understanding the dynamic process of creating knowledge. In Dierkes, M., Antal, A. B., Child, J., & Nonaka, I. (Eds). *Handbook of organizational learning and knowledge*, (pp.491-516). Oxford: Oxford University Press.
- Paul, W. J. & Robertson, K. B. (1976). Job enrichment and employee motivation. Great Britain: Bowker Publishing Company Limited.
- Rotherharm, A. J. (2003). *education modernisation and school choise*. Retrieved from www.educationforum.org.nz.
- Sallins E. & Jones, G. (2002). *Knowledge management in education:Enhancing learing & education*. London: Kogan Page Limited.
- Silins, H. C., Mulford, W. R., & zarins, S. (2002). Organizational learning and school change. *Educational Administration Quarterly*, 38(5), 613-642.
- Senge, P. M. (2006). *The fifth discipline: The art & practice of the learning organization*. London: Random House Business Books.

- Senge, P. M., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R. B., Smith, B. J. (2004). *The fifth discipline fieldbook: Strategies and tools for building a learning organization*. New York: Doubleday.
- Shafritz, J. M., ott, J. S., & Jang, Y. S. (Eds.) (2005). *Classics of organizational theory* (6th ed.). Belmont: Thomson Wadsworth.
- Stone, R. J. (1998). *Human resource management* (3rd ed.). Queensland: John Wiley & Sons.
- Stone, R. J. (2005). *Human resource management* (6th ed.). Queensland: John Wiley & Sons.
- Swann, J., Scarbrough, H., & Robertson M. (2002). The construction of 'Communities of Practices' in the management of innovation. *Management Learning*, 33(77).
- Trice, H. M., & Beyer, J. M. (1993). Hanging organizational cultures. In Shafritz, J. M., ott, J. S., & Jang, Y. S. (Eds.) (2005). *Classics of organizational theory* (6th ed.). Belmont: Thomson Wadsworth.
- Voulalas, Z. D. & Sharpe, F. G. (2005). Creating schools as learning communities: obstacles and processes. *Journal of Educational Admoinistration*, 43(2/3), 187..
- Wright, T. A. & Bonett, D. G. (2007). Job Satisfaction and Psychological Well-Being as Nonadditive Predictors of Workplace Turnover. Retrieved from <http://jom.sagepub.com/cgi/content/refs/33/2/141>.

PARTISIPASI STAKEHOLDER TERHADAP PENINGKATAN MUTU MADRASAH

Oleh : Ilham
(Dosen Tetap IAI Muhammadiyah Bima)

Abstrak:

Rendahnya kualitas atau mutu yang tidak berkualitas dalam proses kependidikan, pada dasarnya ada pada problem pengelolaan yang tidak profesional, baik pada kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun sarana dan prasarana yang tidak memadai serta metode pembelajaran yang tidak sempurna. Adanya problem itu menunjukkan kelemahan dari sistem pendidikan, sehingga hasil dari luaran yang di proses pada lembaga pendidikan tidak mampu untuk bersaing.

Sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia tidak mengalami peningkatan secara merata. Faktor *pertama*, adanya kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production* atau *input-output* yaitu lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi dalam menghasilkan output yang dikehendaki. *Kedua* penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokrasi-sentralistik, sehingga sekolah sangat tergantung pada keputusan birokrasi. *Ketiga*, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan dana bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluatif dan akuntabilitas).

Dengan demikian dalam mewujudkan hal di atas tentunya berimplikasi kepada adanya suatu tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menyelenggarakan pendidikan dan setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan secara merata, bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Kata Kunci: *Partisipasi stakeholders, Peningkatan mutu pendidikan, madrasah.*

Pendahuluan

Pendidikan madrasah secara historis berawal dari kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh ulama pada masjid-masjid dan surau, dengan pembelajaran sistem halaqah. Setelah menjalani proses panjang sistem halaqah mampu melahirkan generasi yang cerdas dan unggul dalam pemahaman keislaman, maka semakin madrasah diminati oleh masyarakat. Karena semakin banyak masyarakat yang menuntut ilmu pengetahuan tidak dapat ditampung oleh masjid, para ulama menyiapkan tempat diluar masjid untuk tempat belajar. Sampai dengan masa sekarang madrasah telah menjadi lembaga pendidikan yang dikelola dengan cara yang dinamis sesuai dengan kemajuan jaman.

Dalam mewujudkan terselenggaranya proses pendidikan madrasah yang efektif untuk menciptakan manusia yang cerdas maka pada setiap jenjang dan jenis serta jalur pendidikan diupayakan penyelenggaraan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam berbagai sudut kegiatan kependidikan madrasah yang sifatnya menyeluruh. Jalur pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sifatnya formal, non formal dan informal, baik yang dikelola oleh lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama (Islam).

Kelahiran pendidikan madrasah di Indonesia yang berawal dari penyelenggaraan pondok pesantren, tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadits dalam kehidupan.¹ Tentu saja tujuannya adalah mencita-citakan terbentuknya Insan Kamil atau muslim paripurna, yang secara eksplisit mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya.

Perkembangan selanjutnya, pendidikan madrasah yang berwujud dalam bentuk lembaga pendidikan mengalami pasang surut sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat pada umumnya. Mulai dari pembelajaran tradisional (pondok pesantren) sampai kepada madrasah seperti dikenal sekarang dan seterusnya perkembangan pendidikan madrasah banyak menghadapi masalah kelembagaan baik dari segi fungsi edukasi maupun dari segi model

¹Zuhairini, Dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Cet. 8, Jakarta: PT. Bumi Aksara Bekerjasama Dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama; 2006). h. 219

pengelolaannya, sehingga terlihat madrasah tidak terselenggara dengan baik bahkan tidak responsif terhadap tuntutan pada saat ini.²

Keadaan ini membuat masyarakat tidak tertarik memasukkan anaknya dalam pendidikan madrasah dan keberadaan madrasah semakin tidak diminati. Usaha peningkatan mutu madrasah adalah merupakan serangkaian kegiatan masyarakat secara terencana terkait dengan usaha menumbuhkembangkan madrasah dalam berbagai aspek dan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kemajuan pendidikan bagi anak-anaknya.

Bila di pandang surut kebelakang, kehadiran madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai program-program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang memiliki visi, misi dan karakteristik yang khas dalam upaya pembangunan dan pembinaan umat.

Namun perkembangan pendidikan madrasah selanjutnya dalam penyelenggaraan kurang kondusif, salah satunya yaitu tidak ada pelibatan penuh yang diberikan kepada masyarakat untuk mengelola pendidikannya, karena adanya kebijakan yang kurang berpihak kepada madrasah khususnya madrasah swasta sehingga kehadiran madrasah dalam konteks pendidikan masa kini tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, akhirnya pendidikan pada madrasah semakin terpinggirkan.³ Kondisi ini berimbas kepada keberadaan peserta didik luaran (output) madrasah kurang memberikan jaminan hidup yang lebih baik secara ekonomis.

Pada masa orde lama, seluruh kebijakan cenderung terpusat dengan kekuasaan politik yang sangat kuat, dimasa ini bantuan dan subsidi yang sebelumnya madrasah menikmati ternyata tidak ada, campur tangan pemerintah kepada madrasah juga tidak nampak, menyebabkan madrasah semakin ketinggalan menurut pandangan masyarakat umum.

Disambung dengan masa orde baru suasana sentralisasi penyelenggaraan semakin meningkat dan lembaga pendidikan menjadi bagian dari birokrasi. Dari sini lembaga pendidikan agama kurang mampu bersaing menjadi bukti lemahnya pembinaan dalam

²Lihat, A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3ES; 1998). h. 78

³M. Khalod Fathoni, *Pendidikan Islam Dalam Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Bogor: Regina; 2005). h. 74

meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam (madrasah).⁴ Hal yang menonjol bagi perkembangannya ialah mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah dengan lahirnya undang-undang pendidikan yang sifatnya setralistik, cenderung mengatur dan melakukan penyeragaman dalam hal struktur sampai masalah yang sifatnya teknis, mengatur kurikulum serta bantuan sarana dan prasarana lainnya. Hal ini tentu saja mempengaruhi kehidupan madrasah khususnya yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Era reformasi yang sedang kita jalani, telah membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam berbagai sudut kehidupan manusia, termasuk pelaksanaan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah manajemen negara, yakni manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi perubahan manajemen ini diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,⁵ yang kemudian diikuti oleh pedoman pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Konsekwensi logis dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut adalah membawa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan semangat otonomi.

Keinginan pemerintah yang digariskan dalam haluan negara agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi, menuntut partisipasi *stakeholder* (pelaku dan pelaksana) pendidikan secara aktif untuk merealisasikan otonomi daerah.⁶ Hal ini memberikan konsep kelanjutan kepada madrasah dalam merumuskan konsep yang lebih strategis baik dari segi model

⁴Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaruan Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta: Lappera; 2002). h. 34

⁵Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika; 1999). h. 7 undang-undang ini menginginkan bahwa pengelolaan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam (madrasah) di otonomkan serta diserahkan kepada daerah untuk mengelola pendidikan yang menjamin mutu pendidikannya, namun posisi pendidikan Islam (madrasah) masih menunai perbincangan, apakah di otonomkan atau tidak ? selanjutnya secara detail bisa di lihat pada halaman 38-39

⁶Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2009). h. 5

pengelolaan yang berbasis sekolah maupun segi kedudukannya yang sepenuhnya dirancang secara sinergis dan pelibatan semua komponen masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan untuk menciptakan sekolah mandiri sehingga kualitas madrasah mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Karena hal itu perlu kesiapan madrasah sebagai wadah dalam pelaksana operasional pendidikan Islam.

Gagasan perbaikan pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 4 ayat 1,⁷ memperoleh tempat yang sangat ideal bagi pendidikan Islam (madrasah), karena keberadaan madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang didalamnya memberikan penguatan pada pengelolaan pendidikan yang demokratis serta mendorong optimalisasi peran serta masyarakat dengan memberikan peluang pada madrasah untuk mengembangkan *networkinghorizontalnya* dengan para *stakeholder*-nya dalam proses perencanaan madrasah, pengembangan kurikulum maupun penetapan berbagai kebijakan untuk kemajuan madrasah.

Suatu hal yang menggembirakan bahwa kebijakan dalam perbaikan pendidikan tersebut, merupakan salah satu modal bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk menemukan bentuknya yang ideal sesuai dengan visi, misi lembaga terkait, termasuk lembaga pendidikan madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kondisi daerah untuk mengembangkan kreatifitas lembaga dalam meningkatkan mutu (kualitas) pelayanannya. Karena melihat kompleksitas dan kemajuan masyarakat sekarang, mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan seharusnya tanggap dan memiliki kemampuan untuk mengakomodir tuntutan perkembangan tersebut dan saatnya pendidikan memberdayakan kondisi lokal daerah dengan segala potensinya. Intinya adalah bagaimana menggugah dan membuka peluang masyarakat lokal untuk berperan serta dalam

⁷Bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa, lihat Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2003). h. 6 hal yang sama juga melihat perbaikan mutu komponen pendidikan yang dituangkan dalam Bab II Pasal 4 kedudukan guru yaitu sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Guru Dan Dosen*, (Jakarta : Sinar Grafika; 2008). h. 6

menentukan arah pendidikan bagi generasi muda sebagai peserta didik.

Hal ini, mengembalikan eksistensi madrasah, bahwa perkembangan madrasah merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari, oleh dan untuk masyarakat.⁸ Ini berarti sudah memberikan ruang dan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk mengelola madrasah secara partisipatif. Oleh karena itu, peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab terbesar berada di tangan pemilik dan pelaksana pendidikan (yayasan, organisasi atau badan pembina madrasah) dan maju mundurnya madrasah sangat ditentukan oleh partisipasi para *stakeholder* bukan ditentukan atas kebijakan dari pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, lembaga pendidikan baik yang dikelola oleh perorangan, kelompok, keluarga, pengusaha dan lembaga masyarakat seperti yayasan, memiliki peran yang sangat menentukan sebagai penyelenggara pendidikan terutama madrasah swasta, ini berarti masyarakat sebagai mitra pemerintah berpeluang untuk berperan serta dalam pendidikan Islam untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu *stakeholder* atau pemilik dan pelaksana pendidikan dapat menciptakan usaha penyelenggaraan dan dinamisasi pendidikan dan bagaimana pengelola pendidikan yang bermuatan lokal relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.⁹ Selain dari hal tersebut persoalan mutu pendidikan perlu menjadi pokok perhatian, sebab mutu atau kualitas output menentukan keberhasilan pendidikan umumnya khususnya madrasah.

Untuk meningkatkan mutu madrasah harus dikelola dan disentuh secara profesional dan fungsional sesuai tuntutan dunia kemanajemenan, artinya berbagai sumber daya yang mempengaruhi terjadinya seluruh proses kegiatan pendidikan perlu ditangani secara terencana, terorganisasi, terarah dan terkendali. Dengan demikian masyarakat sangat berharap bahwa pelaksanaan pendidikan madrasah tidak hanya diserahkan kepada pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab *stakeholder* yakni Pemerintah Daerah, yayasan, kepala madrasah, guru, orang tua murid dan masyarakat (Komite Madrasah) dan tokoh masyarakat

⁸H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2000). h. 169

⁹H. A. R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. RemajaRosdakarya; 1999). h. 62

setempat. Hal ini, sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat dan manajemen berbasis sekolah.

Dari konteks inilah maka partisipasi *stakeholder* atau pemilik dan pelaksana pendidikan secara kolektif dituntut untuk memberikan perhatian yang penuh sesuai dengan kompetensi dan latar belakang masing-masing dalam membangun pola kerja agar madrasah mempunyai pengelolaan yang sistematis, logis, realistis dan strategis dalam upaya perbaikan mutu agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang lainnya.

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa keterlibatan para unsur *stakeholder* dalam penyelenggaraan pendidikan Islam khususnya pada madrasah. Kekurangpahaman para *stakeholder* terhadap partisipasi menjadi satu alasan sehingga kualitas pendidikan menjadi masalah dalam perjalanan kehidupan madrasah. Partisipasi berbagai elemen masyarakat baru menemukan wujud kongkritnya sejak kehadiran komite madrasah, sekaligus membawa warna baru bagi sistem penyelenggaraan pendidikan madrasah.

Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) dalam Sistem Pendidikan Nasional

Catatan sejarah kegiatan pendidikan Islam, lahir tumbuh dan berkembang bersama dengan kehadiran agama Islam yang bermula dari kegiatan pengajian-pengajian dari rumah ke rumah di bawah bimbingan seorang guru atau kiyai yang dalam perkembangannya menjadi sebuah lembaga pondok pesantren.

Berdirinya madrasah karena hasil inisiatif masyarakat setempat, sehingga baik secara perseorangan maupun organisasi segi penyelenggaraannya-pun umumnya bernaung dibawah payung organisasi sosial keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan organisasi lokal. Juga ada milik keluarga, milik perorangan atau yayasan. Segi kualitas sangat beragam dari yang sekedarnya hingga yang unggul, namun umumnya bertahan dalam ragam problem. Mulai dari tempat pendidikan yang kurang memadai, tenaga edukasi yang kurang, dana operasional yang tidak dapat membiayai jalannya pendidikan, sampai kualitas guru dan luaran anak didik. Deretan masalah ini membuat posisi madrasah tidak mampu dibeli masyarakat, apalagi untuk menjadi lembaga pendidikan Islam alternatif bagi dunia modern.¹⁰ bahkan kerap menjadi sekolah pelarian untuk sekedar mendapatkan ijazah formal.

¹⁰Malik Fadjar, *op., cit*, h. 32

Berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjawab realitas madrasah yang dimulai dari SKB Tiga Menteri 24 maret 1975 yang tersohor itu, yang menekankan pada persamaan madrasah dengan sekolah-sekolah umum sehingga status dan ijazah madrasah dipersamakan yang dapat diterima oleh semua perguruan Tinggi. PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar yang menetapkan bahwa madrasah Ibtidaiyyah dan Tsanawiah adalah SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama.

Demikian juga surat Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 1489/U/1992 tentang sekolah menengah Umum, menetapkan madrasah Aliyah sebagai SMU berciri khas agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama. Kesemuanya ini merupakan upaya-upaya penyesuaian dalam penyelenggaraan dengan pembinaan yang berdasar kepada ketentuan pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Sesuai undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yang menetapkan pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan nasional maka, kedudukan madrasah menjadi sama dengan sekolah-sekolah umum. Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan pendidikan nasional juga berlaku untuk pengembangan madrasah. Sudah tentu juga pengintegrasian pendidikan Islam yang diselenggarakan di madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian dalam arti positif.

Dalam kaitan ini madrasah perlu mengkaji kembali hal-hal yang selama ini belum dibenahi sesuai dengan kemajuan jaman. Keadaan ini bukan berarti merupakan kelemahan dari sistem pendidikan madrasah tetapi justru merupakan kekuatan. Masalahnya ialah dengan adanya sistem pendidikan nasional maka berbagai hal perlu distandarisasikan.

Pelaksanaan pendidikan selama ini banyak diwarnai dengan pendekatan sarwa negara, dimasa yang akan datang harus berorientasi pada aspirasi masyarakat, pendidikan harus mengenali siapa pelanggannya dan dari pengenalan ini pendidikan harus memahami apa aspirasi dan apa kebutuhan setelah mengetahui aspirasi dan kebutuhan mereka, ditentukan sistem pendidikan, seperti kurikulum dan persyaratan pengajarannya. Dari berbagai ulasan di atas, sudah saatnya direkomendasikan munculnya "kebijakan berbasis masyarakat", dengan tujuan bagaimana

kebijakan pendidikan itu mendapat respon positif dari masyarakat secara umum.¹¹

Peningkatan mutu madrasah swasta, dalam hal ini telah dilakukan usaha penetapan status madrasah, yang diakreditasi dalam Keputusan Menteri Agama nomor 310 tahun 1989 tentang status madrasah swasta dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam, sedangkan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam keputusan Dirjen Bimbaga Islam Nomor 29/e/1990 tentang pedoman akreditasi madrasah swasta.¹²

Tujuan dilakukannya akreditasi madrasah swasta tersebut adalah mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan melalui:

1. Pembaruan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Tenaga kependidikan yang berkualitas
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang baik
4. Mendorong terciptanya dan terpeliharanya ketahanan madrasah dan lingkungannya
5. Mendapatkan bahan-bahan bagi perencanaan dalam rangka pembinaan madrasah bersangkutan
6. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab
7. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan madrasah
8. Memudahkan pengaturan murid/siswa.¹³

Pelaksanaan akreditasi madrasah meliputi semua aspek penyelenggaraan pendidikan Islam antara lain: kelembagaan, kurikulum, administrasi madrasah, ketenagaan, murid/siswa, sarana prasarana dan situasi madrasah. Berdasarkan akreditasi terhadap komponen-komponen tersebut, ditetapkan jenjang status madrasah swasta tersiri dari: status terdaftar, diakui, dan disamakan, status ini berlaku selama lima tahun.¹⁴

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional baik yang lahir No. 2/1989, disusul dengan UU SPN No. 20/2003, berimplikasi kepada pemetaan kembali setiap bentuk satuan pendidikan baik lembaga pendidikan yang dikelola

¹¹Abdul Rahman Halim, *Kebijakan Dan Partisipasi Masyarakat (Studi Kritis Terhadap perspektif Pembinaan Madrasah Swasta Di sulawesi Selatan)*, (Yogyakarta:Disertasi, 2007) h. 83

¹²*ibid*

¹³Lihat, Husni Rahim, *op., cit.*, h. 111

¹⁴Lihat, Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu; 1999). h. 111

oleh pemerintah maupun swasta termasuk madrasah sebagai satuan pendidikan Islam. Hal ini berimplikasi bahwa madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, bahwa kedudukan madrasah kembali semakin diperkuat, sederajat dengan pendidikan umum yang dikelola oleh Diknas. Pengakuan pemerintah atas madrasah sebagai sub pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi, antara lain dimulai suatu pola pembinaan mengikuti satu ukuran yang mengacu kepada sekolah pemerintah. Artinya madrasah mengikuti kurikulum nasional, ikut serta dalam UAN (Ujian Akhir Nasional), dan berbagai peraturan yang diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional.¹⁵

Sementara perkembangan madrasah semakin disoroti baik sebagai wacana maupun implementasi pelaksanaannya ketika lahir UU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari ini memberikan kondisi yang cukup berpengaruh kepada pendidikan Islam khususnya madrasah. Oleh karena semangat baru yang timbul dengan otonomi daerah akan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berupaya mengelola sendiri kondisi dan kebutuhan daerahnya dalam semua aspek pengembangannya, namun beberapa kewenangan dalam berbagai bidang masih di tangani oleh pusat, seperti: *bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan serta bidang agama*.¹⁶

Dari sini melahirkan beberapa pendapat yakni: *pertama*, bahwa pendidikan Islam yang diasuh Departemen Agama tidak di otonomkan. Hal ini menunjukkan pendidikan di Departemen Agama dikategorikan sebagai bagian dari agama. Bukan bagian dari sistem pendidikan nasional. *Kedua*, pendidikan yang dikelola Departemen Agama adalah bagian sistem pendidikan nasional, karena itu pendidikan di otonomkan. Kenyataan ini membuat madrasah dihadapkan kepada dua pilihan: *pertama*, Madrasah dalam pengelolaannya tetap diatur secara sentralistik, *kedua*, madrasah diserahkan pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota sebagai konsekuensi dari Undang-Undang otonomi daerah dibidang pendidikan.¹⁷

¹⁵ Lihat, Abdurrahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada; 1998). h. 23

¹⁶ Lihat, Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2004 (UU RI No. 32 Th 2004)* (Jakarta: Sinar Grafika; 2005). h. 10-11

¹⁷ Lihat Abd. Rahman Halim, *op. cit.* h. 247

Hal-hal tersebut bukanlah merupakan hal kebetulan tetapi adalah akibat terjadinya perubahan dalam sistem kenegaraan, yang tentu mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali bidang pendidikan.

Karena madrasah sudah termasuk dalam sistem pendidikan nasional, maka untuk memilih alternatif di atas, dalam tulisan ini penulis lebih cenderung madrasah dari segi pengelolaannya diotonomikan. Karena dengan otonomi ini merupakan peluang besar dalam memberikan keuntungan terhadap madrasah untuk melakukan pengembangan berupa inovasi-inovasi baru bagi penyelenggaraan pendidikan Islam khususnya madrasah. Keuntungan yang di maksud antara lain:

1. Madrasah menjadi kuat kedudukannya sebagai bagian dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN), yang implikasinya bagi madrasah memiliki kesejajaran dengan sekolah umum dan mungkin diskriminasi sudah hilang.
2. Para pembina dan kepala sekolah serta guru-guru akan lebih bebas mengembangkan diri dalam pengelolaan madrasah.
3. Suasana akademik akan lebih berkembang karena pengelolaan yang terprogram berkat partisipasi dari semua tenaga yang ada.
4. Elemen masyarakat lebih dapat dimanfaatkan oleh pembina madrasah baik kepala sekolah maupun guru.
5. Pembinaan administrasi akan berimbang dengan pengembangan kreatifitas di bidang akademik.

Meskipun demikian, muncul juga kekhawatiran dari banyak pihak ketika madrasah dilimpahkan ke daerah dan pembinaannya jangan sampai ciri khas madrasah tak dapat dipertahankan justru pembinaannya dilakukan oleh tenaga yang kurang memahami "ruh" dari madrasah itu sendiri, malah mungkin pengelolaan bukan berlatar belakang madrasah. Walaupun demikian sebagai undang-undang otonomi, sudah sepatutnya mendapat sambutan dalam pengimplementasiannya.

Merupakan suatu kearifan apabila selalu mencari alternatif pemecahan yang dapat mendukung keberlangsungan madrasah sebagai institusi pendidikan yang harus berjalan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat. Selain dari hal tersebut otonomi daerah juga dapat memberikan kesempatan kepada madrasah berkiprah dalam pengembangan kemitraan secara bebas, dengan lembaga lain terkait dengan peningkatan kualitas atau mutu dalam berbagai aspek.

Partisipasi Stakeholder Dalam Upaya Peningkatan Mutu Madrasah

Pengertian pembangunan masyarakat menurut Solihin adalah proses yang melibatkan semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat yang ada kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memberikan kesempatan yang bebas yang memungkinkan masyarakat tersebut untuk membantu kemajuan dan kemakmuran bangsa.¹⁸ Dari pengertian tersebut diketahui bahwa dalam konteks pembangunan, masyarakat merupakan komponen penting yang harus dilibatkan dalam melaksanakan proses pembangunan. Hal tersebut berarti bahwa pembangunan akan berhasil dengan baik jika dapat secara maksimal melibatkan masyarakat meskipun disisi lain pembangunan masyarakat juga menjadi bahagian dalam proses pembangunan itu sendiri.

Secara teoritis, konsep partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas adalah sebuah pendekatan strategis yang relevan digunakan dalam meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan pembangunan di era otonomi daerah. Sebuah model yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Demikian juga bidang pendidikan agama Islam yang dilembagakan pada madrasah telah mengikuti paket otonomi daerah secara menyeluruh. Usaha untuk menerapkan konsep partisipasi sebagai sebuah pendekatan pembangunan akan menjadi kekuatan strategis dalam menyongsong masa depan madrasah, hal ini akan meningkatkan peran pemberdayaan menyangkut sekolah madrasah yang selama ini menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas penyelenggaraannya.¹⁹

Madrasah dan lingkungan sosial adalah dua hubungan timbal balik. Madrasah adalah lembaga yang memikul aspirasi yang dirumuskan dalam visi dan misi sebagai satu cita-cita, sedangkan masyarakat menjadi subyek dan obyek dalam mewujudkan misi dan visi tersebut. Dengan demikian konsep partisipasi para pemangku kepentingan pendidikan memiliki manfaat ganda pada peningkatan mutu dan kualitas sekolah/madrasah. Hubungan sinergis di antara

¹⁸Solihin, *Makalah Peran Stakeholders Dalam Pelestarian Lingkungan*, (Bima-NTB: Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara; Seminar Nasional Lingkungan Hidup di STKIP Bima; 4 April 2009), h. 2

¹⁹ Lihat, Djohar, *Reformasi dan masa depan Pendidikan Di Indonesia*, (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta; 2000). h. 10

keduanya kelak mengembalikan posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang populis. Kenyataan dilapangan bahwa terjadinya stagnasi penyelenggaraan madrasah karena tidak adanya partisipasi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat disekitarnya.

Dilihat dari segi tujuan dan pelaku partisipasi maka konsep ini dapat menjadi pisau analisis dalam mengkaji, menyelesaikan masalah yang dihadapi madrasah, juga sangat sejalan dengan irama otonomi yang mengedepankan masyarakat, wiraswasta, sebagai lokomotif pembangunan. Hal tersebut membuat konsep ini akan semakin mendapat ruang luas untuk direalisasikan di era otonomi daerah. Peran seluruh unsur *stakeholder* pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan.

Dilihat dari keberadaannya bahwa madrasah sudah termasuk dalam Sistem Pendidikan Nasional dalam arti bahwa madrasah adalah bagian dari paket otonomi pendidikan yang dari sudut sosiologis dan institusional lebih memiliki peluang proses dalam melaksanakan otonomi pendidikan dibanding dengan sekolah lainnya. Sebuah persyaratan menuju otonomi telah lama dimiliki oleh madrasah yakni sekolah yang lahir dari akar sosiologis yang merupakan lembaga pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.²⁰

Usaha menerapkan konsep partisipasi *stakeholder* dalam meningkatkan mutu madrasah adalah usaha mentransformasikan peran partisipasi seluruh elemen dalam memajukan pendidikan madrasah. *Stakeholder* bermakna pelaku dan pelaksana terdiri dari tiga domain, *pertama* pemerintah, *kedua* masyarakat dan *ketiga* lembaga wiraswasta. Tiga domain ini menjadi tritunggal sebagai pelaku dan pelaksana dalam meningkatkan kualitas madrasah.

Stakeholder dalam hal ini, pemerintah daerah adalah penanggung jawab dalam memajukan pendidikan di daerah yang harus merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi perbaikan utama yang berkaitan dengan kualitas dan mutu pendidikan. Sedangkan masyarakat dan wiraswasta adalah pelaksana dalam menyelenggarakan pendidikan dengan ikut terlibat secara langsung baik menyangkut ide/gagasan, harta benda maupun tenaga dalam upaya memajukan lembaga madrasah. Partisipasi *stakeholder* dalam hal tersebut, madrasah tidak diperbolehkan berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah secara partisipatif.

²⁰Lihat, H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2000). h. 169

Beberapa masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan madrasah secara partisipatif:

1. Perencanaan Partisipatif

Konsep partisipatif menggunakan ide dasar desentralisasi dengan pendekatan *button-up*. Rumusan ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintahan dan wirausaha dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah, sehingga menghasilkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lokal. Selain itu, rumusan tersebut juga akan memfasilitasi, koordinasi dan integrasi perencanaan dari pengambilan keputusan dan pelaksana pada madrasah.

Kebijakan penyelenggaraan madrasah yang sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan sangat tergantung kepada siapa yang menentukannya, siapa yang dapat mempengaruhinya dan bagaimana melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun masyarakat, pemerintah dan wiraswasta harus dipandang sebagai bagian proses dari pelaku dan pelaksana dalam perencanaan madrasah.

Ide dasar dari perencanaan partisipatif adalah masyarakat yang merupakan potensi sosio ekonomi yang paling besar, sekaligus menjadi subyek penyelesaian masalah dan menfokuskan hak-hak yang dimiliki masyarakat agar dapat terlibat secara demokratis dalam proses pelaksanaan pembangunan. Disamping itu, keterlibatan masyarakat tidak diartikan sebagai keistimewaan yang diberikan pemerintah, melainkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari *stakeholder* pelaku sekaligus pilar pembangunan.²¹

2. Manfaat perencanaan partisipasi

Adanya hubungan dialogis tersebut, perencanaan partisipasi mendorong masyarakat dan aparat pemerintah secara bersama-sama mencari jalan keluar dari berbagai masalah madrasah yang dihadapi perencanaan partisipasi akan dapat membangun kapasitas lokal untuk mendorong pengelolaan pembangunan madrasah secara partisipasi sebagai hasil dari pendekatan tersebut.

Beberapa manfaat perencanaan partisipatif dibawah ini, yakni antara lain: *efesiensi*, partisipasi secara umum bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan madrasah

²¹ Lihat, Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori (dengan pendekatan sistem)*, (Jakarta: Rineka Cipta; 1990). h. 20

dan sumber daya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan karena perencanaan ini sejak awal telah melibatkan masyarakat, wirausaha sebagai pilar, maka kepentingan mereka akan terpenuhi. *Efektif*, perencanaan partisipatif dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan sekolah madrasah, karena dengan keterlibatan *stakeholder* sebagai pemilik sekolah yang lebih mengetahui kondisi, potensi, serta kapasitas sekolah lokal, maka kebutuhan dan kepentingan lokalpun akan dapat teridentifikasi dan terakomodasi. *menjalin kemitraan*,. Dapat mendorong terwujudnya kemitraan madrasah antara berbagai pelaku pembangunan yang didasarkan pada rasa saling percaya. Semua pihak semakin dapat terbuka dan terus terang dalam mengemukakan kebutuhan dan kepentingannya yang akhirnya dapat saling memahami. *Memberdayakan kapasitas* meningkatkan kapasitas para pelaku, khususnya dalam melakukan dialog untuk mencapai konsensus dan kemitraan bersama.

Simpulan

Demokratisasi pengelolaan pendidikan berarti mendorong tanggung jawab peningkatan dan perbaikan kualitas pada madrasah terutama pada sektor pengelolaan tenaga guru dan kepala sekolahnya hal tersebut dimaksudkan untuk mengorganisir berbagai program peningkatan kualitas hasil belajar melalui perbaikan proses pembelajaran. *Stakeholder* untuk maksud tertentu dengan didukung para relasi yang lain bertugas melakukan fasilitasi terhadap berbagai upaya pengembangan sekolah/madrasah, sehingga sumber daya manusia (SDM) lulusan sekolah/madrasah kompetitif dipasar kerja, lokal, nasional, regional bahkan global.

Pengelolaan pendidikan madrasah dengan sistem demokratisasi menghendaki adanya partisipasi dan peran serta semua unsur pelaksana pendidikan (*stakeholder*) pada sebuah lembaga pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah untuk menentukan sekolah/madrasah yang berkualitas. Hal ini tidak saja partisipasi dalam bentuk perumusan berbagai kebijakan kurikulum maupun partisipasi pengembangan proses pembelajaran, tetapi juga harus didukung dengan iklim demokrasi dalam organisasi madrasah itu sendiri, agar semua unsur sekolah tersebut mempunyai rasa memiliki terhadap program sekolah serta meningkatkan tanggung jawab dan partisipasinya untuk perbaikan-perbaikan madrasah/sekolah tersebut.

Daftar Pustaka

- Bastian, Aulia Reza, *Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaruan Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta: Lappera; 2002).
- Djohar, *Reformasi dan masa depan Pendidikan Di Indonesia*, (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta; 2000)
- Fadjar, A. Malik, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3ES; 1998).
- Fathoni, M. Khalod, *Pendidikan Islam Dalam Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Bogor: Regina; 2005).
- H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2000).
- H. A. R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya; 1999).
- Mastuhu, *Membererdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu; 1999)
- Pidarta, Made, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori (dengan pendekatan sistem)*, (Jakarta: Rineka Cipta; 1990)
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2003).
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2009).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Guru Dan Dosen*, (Jakarta : Sinar Grafika; 2008).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika; 1999)

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2004 (UU RI No. 32 Th 2004)* (Jakarta: Sinar Grafika; 2005)

Shaleh, Abdurrahman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada; 1998).

Solihin, *Makalah Peran Stakeholders Dalam Pelestarian Lingkungan*, (Bima-NTB: Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara; Seminar Nasional Lingkungan Hidup di STKIP Bima; 4 April 2009).

Zuhairini, Dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Cet. 8, Jakarta: PT. Bumi Aksara Bekerjasama Dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama; 2006).

**PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN
MODEL SKEMP DISERTAI DISKUSI KELOMPOK KECIL
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA**

Oleh: Dewi Sartika

*(Dosen Program Studi Pendidikan Matematika
STKIP Bima)*

ABSTRAK

Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu. Dengan pemahaman, siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok bilangan bulat pada kelas VII SMPN 2 Palibelo tahun pembelajaran 2014/2015.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen, Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 2 Palibelo tahun pembelajaran 2014/2015, sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIIb dan VIIc dengan jumlah 57 siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan maka secara deskriptif hasil belajar matematika siswa kelas VII_B SMPN 2 Palibelo yang menggunakan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil dengan nilai rata-rata 81,58 dengan standar deviasi 11.68. Dari hasil analisis tersebut, maka secara deskriptif terlihat adanya perbedaan hasil belajar matematika kelas VIII_B yang menggunakan model skemp dengan hasil belajar matematika kelas VIII_C yang tidak menggunakan model skemp. Hal ini diperkuat oleh hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan uji-t yaitu dibandingkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,424 > 1,674$) dengan taraf signifikan (α) = 0,05.

Kata Kunci: *Metode Pembelajaran Model Skemp, Diskusi
Kelompok Kecil dan Prestasi Belajar Siswa*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan oleh Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Guru merupakan bagian terpenting dalam pendidikan, sehingga guru harus memiliki berbagai kompetensi antara lain kompetensi profesional yaitu menguasai materi dan berbagai metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Guru memiliki tugas utama yaitu mengajar dan membimbing, guru juga bertugas menanamkan nilai-nilai dan sikap kepada anak didik agar anak didik memiliki kepribadian yang paripurna. Dengan keilmuan yang dimilikinya, guru membimbing anak didik dalam mengembangkan potensinya. Guru adalah komponen penting dalam pendidikan. Dipundaknya siswa menggantungkan harapan terhadap pelajaran yang diajarkannya. Benci atau sukanya siswa terhadap suatu pelajaran salah satunya bergantung pada bagaimana guru mengajar. Berhasilnya guru memikat perhatian siswa dalam proses belajar mengajar merupakan modal besar untuk mencapai prestasi hasil belajar yang baik. Sebaliknya, tidak berhasilnya guru menarik perhatian siswa akan menimbulkan kebebasan yang negatif dalam belajar.

Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang diharapkan.

Pemahaman matematis penting untuk belajar matematika secara bermakna, tentunya para guru mengharapkan pemahaman yang dicapai siswa tidak terbatas pada pemahaman yang bersifat dapat menghubungkan. Belajar bermakna bila informasi yang akan dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa sehingga siswa dapat mengkaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimiliki. Artinya siswa dapat mengkaitkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan keadaan lain sehingga belajar dengan memahami.

Dalam bukunya, *The Psychology of Learning Mathematics*. Skemp (1987: 210) menulis "*To understand something means to assimilate it into an appropriate schema*". Jadi terlihat adanya perbedaan antara pemahaman dengan memahami sesuatu. Pemahaman dikaitkan dengan "kemampuan (*ability*)" dan memahami sesuatu dikaitkan dengan "assimilasi" dan "suatu skema yang cocok (*an appropriate schema*)". Skema diartikan oleh Skemp sebagai grup konsep-konsep yang saling terhubung, masing-masing konsep dibentuk dari abstraksi sifat-sifat yang invarian dari input sensori motor atau dari konsep lainnya. Hubungan antara, konsep-konsep ini dikaitkan oleh suatu relasi atau transformasi. Selanjutnya, dikatakan bahwa skema ini digunakan tidak hanya ketika memiliki pengalaman sebelumnya terkait dengan situasi sekarang, tetapi juga digunakan ketika memecahkan masalah tanpa memiliki pengalaman tentang situasi sekarang

Model Pembelajaran Skemp

Metode Pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya: (1) ceramah; (2) demonstrasi; (3) diskusi; (4) simulasi;

Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan

penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

Metode pembelajaran model skemp adalah metode yang menitikberatkan pada pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika pada proses pembelajaran di dalam kelas. Pada metode pembelajaran model skemp ini, pemahaman yang dimaksud dapat dibedakan menjadi :

a. Pemahaman instrumental

Pemahaman instrumental yaitu hafal sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/ sederhana, mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja. Pemahaman instrumental diartikan sebagai pemahaman konsep yang saling terpisah dan hanya hafal rumus dalam perhitungan sederhana. Dalam hal ini seseorang hanya memahami urutan pengerjaan atau algoritma. Pengetahuan yang didapat pada pemahaman ini adalah pengetahuan yang "diterima" siswa, diberikan kepada mereka dalam bentuk informasi atau keterampilan yang terisolasi, bukan diperoleh siswa secara aktif. Pemahaman seperti itu merupakan pemahaman matematika yang paling dangkal.

b. Pemahaman relasional

Pemahaman relasional yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. Pemahaman relasional termuat skema atau struktur yang dapat digunakan pada penjelasan masalah yang lebih luas dan sifat pemakaiannya lebih bermakna. Tingkat pemahaman ini lebih tinggi dari pemahaman instrumental, dimana siswa terlibat aktif mengidentifikasi, menganalisis dan mensintesis pola-pola serta saling keterkaitan dalam memperoleh pengetahuan. Ciri-ciri dari tingkat pemahaman ini adalah kemampuan mengidentifikasi pola, menyusun definisi, mengaitkan konsep yang satu dengan yang lain.

Pemahaman matematika didefinisikan sebagai kemampuan mengaitkan notasi dan simbol matematika yang relevan dengan ide-ide matematika dan mengkombinasikannya ke dalam rangkaian penalaran logis (*The ability to connect mathematical symbolism and notation with relevant mathematical ideas and to combine these ideas into chains of logical reasoning*) (Skemp, 1987: 210).

Adapun tahapan-tahapan pembelajaran model skemp adalah sebagai berikut :

1. Kongkrit–Reflektif

Guru menjelaskan konsep secara figuratif dalam konteks yang familiar berdasarkan istilah-istilah yang *terkait* dengan konsep yang telah diketahui siswa.

2. Kongkrit-Aktif

Guru memberikan tugas dan dorongan agar siswa melakukan eksplorasi, percobaan, mengukur, atau membandingkan sehingga dapat membedakan konsep baru ini dengan konsep–konsep yang telah diketahuinya.

3. Abstrak–Reflektif

Siswa membuat atau memilih pernyataan yang terkait dengan konsep baru, memberi contoh kontra untuk menyangkal pernyataan yang salah dan membuktikan pernyataan yang benar bersama-sama dengan guru.

4. Abstrak–Aktif

Siswa melakukan praktik (latihan) menggunakan konsep baru untuk memecahkan masalah dan mengembangkan strategi. Pada tiap-tiap tahapan pembelajaran, guru memiliki peran yang berbeda-beda. Ketika siswa melakukan kongkrit-reflektif guru bertindak sebagai seorang storyteller (pencerita), ketika siswa melakukan kongkrit-aktif guru bertindak sebagai seorang pembimbing dan motivator, ketika siswa melakukan abstrak-reflektif siswa bertindak sebagai nara sumber, dan ketika siswa melakukan abstrak–aktif guru bertindak sebagai coach (pelatih). Pada setiap tahap pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk bertanya, dan guru mungkin langsung menjawabnya, mengarahkan aktivitas untuk memperoleh jawaban, atau meminta siswa lain untuk menjawabnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen bentuk *True Experimental Design* (desain eksperimen yang benar) karena menggunakan 2 kelas yaitu kelas eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil dan kelas kontrol tidak menggunakan metode pembelajaran skemp disertai diskusi kelompok kecil. Adapun rencana penelitiannya sebagai berikut :

Tabel: **Rancangan Penelitian**

Kelas	Data awal (pre-tes)	Metode pemb. Skemp	Data akhir (post-test)
Eksperimen	Ya	Ya	Ya
Kontrol	Ya	Tidak	Ya

Hasil pos-tes kelas eksperimen dan kelas kontrol digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 2 Palibelo Tahun Pembelajaran 2013/2014 pada materi Bilangan bulat. Bentuk soal pre-tes dan pos-test berupa pilihan ganda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskriptif Data Kelas Eksperimen

Dari hasil analisis deskriptif sebagaimana yang terlampir dalam lampiran, Maka statistik skor hasil belajar bilangan bulat pada kelas yang di ajar dengan menggunakan Metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1 : **Distribusi Frekuensi Kelas Eksperimen**

No	Kelas Interval	Frekuensi (f)
1	60 – 66	3
2	67 - 73	4
3	74 - 80	10
4	81 - 87	2
5	88 – 94	3
6	95 – 101	7
Jumlah		29

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil belajar pada pokok bahasan bilangan bulat untuk

kelas eksperimen tergolong tinggi dengan rata-rata **81,58** dari skor maksimum yang mungkin dicapai oleh sebagian kecil peserta didik yaitu **100** dengan standar deviasi 11,87 (perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 71 dan 72)

Tabel 2: Deskriptif Hasil Belajar Kelas Eksperimen

No	Statistik	Nilai
1	Ukuran sampel	29
2	Nilai ideal	100
3	Skor maksimum	100
4	Skor minimum	60
5	Rata-rata	81,58
6	Modus	76,5
7	Median	78,75
8	Range	40
9	Varians	141
10	Standar deviasi	11,87

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa rata-rata skor hasil belajar 81,58 dengan Standar Deviasi 11,87.

Deskripsi Data Kelas kontrol

Dari hasil analisis deskriptif sebagaimana yang terlampir dalam lampiran , maka statistik skor hasil belajar bilangan

Tabel 3: Distribusi Frekuensi Data Kelas kontrol.

No	Kelas interval	Frekuensi (f)
1	55 – 61	2
2	62 – 68	4
3	69 – 75	11
4	76 – 82	5
5	83 – 89	4
6	90 - 96	2
Jumlah		28

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil belajar pada pokok bahasan bilangan bulat pada kelas VII c untuk kelas kontrol yang tidak menggunakan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil mempunyai nilai rata-rata di bawah kelas eksperimen yaitu rata-rata 74.75 dari skor maksimum yang mungkin dicapai oleh peserta didik yaitu 95 dengan standar deviasi 9.20 (perhitungan selengkapnya lampiran 7 halaman 72 dan 73).

Tabel 4 : Deskriptif Nilai Hasil Belajar Kelas kontrol

No	Statistik	Nilai Statistik
1	Sampel Ukuran	28
2	Nilai ideal	100
3	Skor maksimum	95
4	Skor minimum	55
5	Rata-rata	74,75
6	Modus	72,26
7	Median	73,59
8	range	40
9	varians	84,71
10	standar deviasi	9,20

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa rata-rata skor hasil belajar 74,75 dengan Standar Deviasi 9,20.

Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil terhadap prestasi belajar matematika pokok bahasan bilangan bulat, diolah dengan uji- t "*polled varians*". Berdasarkan perhitungan didapat $t_{hitung} = 2,424$ dan dengan taraf signifikan (α) = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = $n_1 + n_2 - 2 = 29 + 28 - 2 = 55$ sehingga didapat $t_{tabel} = 1,674$.

Dari hasil perhitungan diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,424 > 1,674$) berarti uji hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil terhadap prestasi belajar siswa materi pokok bilangan bulat pada siswa VII SMPN 2 Palibelo tahun pembelajaran 2013/2014

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan maka secara deskriptif, prestasi belajar matematika siswa kelas VII_B SMPN 2 Palibelo yang menggunakan metode pembelajaran model skemp bervariasi dengan rata-rata 81.58 dengan standar deviasi 11,87 . Secara deskriptif diketahui pula bahwa prestasi belajar matematika siswa kelas VII_C SMPN 2 Palibelo yang tidak menggunakan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil juga bervariasi dengan rata-rata 74,74 dengan standar deviasi 9.20.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka secara deskriptif terlihat adanya pengaruh penerapan metode pembelajaran model

skemp disertai diskusi kelompok kecil dengan prestasi belajar matematika kelas VII_B SMPN 2 Palibelo yang menggunakan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil. Hasil tersebut juga diperkuat oleh hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan uji-t. Dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa siswa yang diajar dengan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil lebih baik dibanding dengan siswa yang diajarkan tidak menggunakan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil dalam meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 2 Palibelo

Dari hasil analisis yang diperoleh, cukup mendukung teori yang dikemukakan pada kajian teori. Bila ditinjau dari keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar pada kelas eksperimen, ternyata siswa yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil menampakkan keterlibatannya dan lebih bergairah dalam menerima pelajaran, maka siswa mengkonstruksi sendiri materi pelajaran dengan sendirinya, dan siswa mampu menjelaskan hasil diskusinya. Dengan diterapkan pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil, siswa lebih aktif dalam belajar.

Pada metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil, siswa dibagi kedalam 15 kelompok atau pasangan, dimana setiap pasangan terdiri dari 2 atau 3 orang. Proses pembelajaran dimulai dengan penyampaian materi, dilanjutkan dengan pemberian soal secara menyeluruh terhadap semua siswa. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir secara individual untuk membangun asumsi awal dan selanjutnya siswa diarahkan untuk berdiskusi. Dan selanjutnya siswa diminta untuk mempersentasikan hasil diskusi secara bergilir.

Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan penerapan metode pembelajaran model skemp disertai diskusi kelompok kecil terhadap prestasi belajar siswa pada materi bilangan bulat pada siswa kelas VII SMPN 2 Palibelo.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran model *skemp* disertai diskusi kelompok kecil terhadap prestasi belajar siswa pada

materi pokok bilangan bulat pada kelas VII SMPN 2 PALIBELO Tahun Pembelajaran 2014/2015. hal ini terbukti dari hasil perhitungan $t_{hitung} = 2,424$ dan $t_{tabel} = 1,674$

DAFTAR PUSTAKA

- Adinawan, M. Cholik dan Sugijono. 2005. *Matematika Untuk SMP / MTs Kelas VII*. Jakarta : Erlangga
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Djamarah, Saiful Bahri. 2002. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Usaha Nasional : Surabaya Indonesia.
- Furchan, H. Arief, 2007. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Habibuddin, Dkk. 2009. *Bahan Ajar Mata Kuliah Penelitian Pendidikan*. STKIP Hamzanwadi Selong
- Marpaung, Y. 1999. *Perubahan paradigma pembelajaran disekolah*. Yogyakarta: makalah disajikan dalam seminar nasional pendidikan matematika, universitas sanata darma yogyakarta
- Nasution, 1995. *Matematika II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. *Matematika Konsep Dan Aplikasinya*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Nurkencana, Wayan. 1986, *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ridwan. 1993. *Pengantar Metode Statistik (Diktat Perkuliahan)* . Selong : STKIP Hamzanwadi.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Sic
- Slameto. 1995. *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI MASA BANI UMAYYAH

Oleh: Nurlailah

(Dosen Tetap IAI Muhammadiyah Bima)

Abstrak:

Dinasti Bani Umayyah terkenal sebagai era agresif, karena banyak kebijakan politiknya yang bertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syiria, Palestina, Jazirah Arab, Iraq, Persia, Afganistan, Pakistan, Uzbekistan dan wilayah Afrika Utara sampai Spanyol. Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan dalam berbagai bidang, baik politik, ilmu pengetahuan, social, kebudayaan, seni, ekonomi, militer serta teknologi komunikasi. Dalam bidang yang terakhir ini, Muawiyah mencetak uang, mendirikan dinas pos, dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya disepanjang jalan, beserta angkatan bersenjata yang kuat.

Bani Umayyah adalah keturunan dari Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf, salah satu suku Quraisy yang memiliki kedudukan sangat penting di kalangan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Sebagai keluarga bangsawan, Bani Umayyah merasa kedudukan dan kekuasaannya terancam dengan kemunculan agama Islam yang dibawa oleh seorang Rasul dari keturunan Bani Hasyim. Pada zaman pra-Islam Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hasyim yang juga merupakan bagian suku Quraisy.

Semenjak berkuasa, Bani Umayyah memulai langkah-langkah baru untuk merekonstruksi otoritas dan sekaligus kekuasaan khalifah, dan menaekkan paham golongan bersama dengan elite pemerintah. Di mulai dari mengubah koalisi kesukuan Arab menjadi sebuah sentralisasi Monarkis. Di samping itu juga memperkuat barisan militer dan memperluas kekuasaan administratif Negara dan merancang alasan-alasan moral dan politis yang baru demi kesetiaan terhadap khalifah.

Kata Kunci: *Bani Umayyah, Perkembangan, Politik, Ekonomi.*

Pendahuluan

Pada umumnya sejarawan memandang negative terhadap Muawiyah sang perintis Dinasti Bani Umayyah, hal ini disebabkan cara yang ditempuh Muawiyah untuk memperoleh kekuasaannya melalui arbitrase yang curang dan dia juga disebut sebagai sang pengkhianat. Bani Umayyah juga termasuk orang-orang yang kasar dan buas, banyak celaan, sindiran, dan kemarahan ditujukan kepada Bani Umayyah, hal ini juga mungkin karena sikap Bani Umayyah yang selalu melawan Bani Hasyim sejak awal sebelum Islam hingga pada perebutan kekuasaan (khalifah) yang banyak memakan korban dari pihak Bani Hasyim, kita teringat dengan sejarah .bagaimana Muawiyah berperang melawan Sayyidina Ali untuk memperebutkan khalifah, Yazid yang meneteskan darah dengan Husain pada pertempuran di Karbala.

Muawiyah juga dituduh sebagai perusak sistem demokrasi ala Islam (syuro) karena mengubah pemimpin negara dari dipilih oleh rakyat melalui baiat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan secara turun temurun masa ini disebut sebagai masa *monarchiheriditis*. Masa pemerintahan Bani Umayyah berumur 90 tahun, (kerajaan turun-temurun) yang bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Islam dan berbeda dengan yang diterapkan oleh keempat khalifah sebelumnya.

Muawiyah ibn Abu Sofyan

Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama dari Daulah tersebut. Muawiyah lahir empat tahun menjelang Nabi Muhammad menjalankan dakwah di kota Mekah pada tahun 610 M. Ia ber-iman di kota Mekah dalam usia masih muda dan turut hijrah ke Yastrib (Madinah). Ia menjabat salah seorang sekretaris (Al Kuttab) dari Nabi Muhammad SAW (570-632) sebagai pencatat setiap Ayat-ayat Suci yang turun, baik di Makah maupun di Madinah. Ia turut dalam medan peperangan pada masa Nabi Muhammad SAW bahkan pernah berhadapan dengan bapak kandungnya sendiri Abu Sofyan ibn Harb beserta saudara-saudaranya yang belum beriman. Tetapi bapaknya dan ibunya Hindun beserta saudara-saudaranya tersebut akhirnya beriman disekitar tahun 631 M sewaktu pasukan Islam berhasil menguasai kota Makah Al Mukarramah dan lalu wilayah kekuasaan Islam membentang diseluruh semenanjung Arabia menjelang Nabi Muhammad Saw wafat tahun 632 M.

Pada masa daulat Khulafaur Rasyidin (632-661 M) ia diangkat menjabat Panglima Pasukan diantara tiga Panglima Pasukan lainnya yang berada dibawah pimpinan Panglima Besar Ubaidillah ibn Jarrah,

yang ditugaskan khalif Abu Bakar (632-634 M) berangkat ke-utara, untuk merebut wilayah Palestina, Suriah dan Mesir dari tangan imperum Roma Timur yang telah menguasai ketiga wilayah itu semenjak tahun 63 sebelum Masehi. Kaisar Heraklius (610-641 M) yang memimpin penangkisan terhadap serangan besar itu terpaksa pada akhirnya meninggalkan Suriah pada tahun 637 M menuju ibu kota Constantinople. Kemenangan pada berbagai medan peperangan itu terjadi pada masa pemerintahan Khalif Umar ibn Khatab (634-644 M).

Pada masa pemerintahan Khalif Utsman ibn Affan (644-656 M) ia diangkat menjabat Vice-Roy (al Wali) untuk wilayah Suriah dan Palestina, berkedudukan di Damaskus menggantikan Vice-Roy Ubaidah Ibn Jarrah. Huru-hara di Madinah, dibawah pimpinan Muhammad ibn Abibakar, putra almarhum Khalif Abu Bakar, menyebabkan Khalif Utsman mati terbunuh.

Sepeninggalnya dan selama masa pemerintahan Khalif Ali ibn Abithalib (656-661 M) berlangsung krisis dan pertentangan yang sangat tajam di dalam negeri sehingga perluasan wilayah arah keluar terhenti. Pada saat itu Muawiyah di Damaskus mengumumkan dirinya menjabat Khalif hingga pecah Perang Shiffin yang terkenal itu.

Khalif Ali akhirnya gugur menjadi korban pembunuhan politik oleh seorang anggota sekte Khawarij sewaktu sholat Subuh dalam Masjid Nabawi di Madinah. Muawiah di Damaskus dan Amru ibn Ash di Fustat sempat selamat dari rencana pembunuhan itu, yang direncanakan harus terjadi pada hari dan saat yang bersamaan pada ketiga-tiga tokoh Islam.¹

Pembentukan Bani Umayyah

Dengan berakhirnya pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah yang merupakan seorang politisi dimana pengalaman politik sebagai gubernur Syam pada zaman khalifah Utsman bin Affan, cukup mengantarkan dirinya untuk mengambil alih kekuasaan dari genggamannya keluarga Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Husain putra Ali bin Abi Thalib dapat dikalahkan dalam pertempuran di Karbala.²

Lahir dan berkembangnya dinasti Umayyah tidak luput dari berbagai peristiwa penting, beberapa peperangan untuk memperebutkan

¹ Joesoeb Soueyb, *Sejarah Daulah Umayyah di Damaskus*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 13-14

² Ibnu Anshari, *Sejarah Peradaban Islam Studi Pengantar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2004), 103

dan mempertahankan kekuasaan telah terjadi pada masa itu, diantaranya perang Shiffin antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib.

Suatu peristiwa tragis yang tidak akan pernah dilupakan oleh kaum Syiah adalah wafatnya Husain bin Ali pada tanggal 10 Muharram 61 H/ 10 Oktober 680 M, yaitu pada pemerintahan Yazid bin Muawiyah, ketika itu Husain bersama rombongannya yang berjumlah 200 orang menuju Irak, dihadang dan dikepung di Karbala oleh Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukan berjumlah 4000 orang. Husain terbunuh dan kepalanya dipenggal dan dikirim kepada Yazid. Peristiwa tersebut disebut kaum Karbala yang melahirkan yel-yel perang kalangan Syiah yang berbunyi tuntutan balas kematian Husain.

Gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) tampil sebagai kekuatan baru yang besar. Kekuatan ini bukan datang secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang sistematis dan mendapat dukungan yang luas dari berbagai pihak. Muawiyah adalah pembangun dinasti Umayyah dan sekaligus menjadi khalifah pertama.

Keberhasilan Muawiyah dalam mendirikan Dinasti tidak semata-mata terukur karena kemenangan diplomasi di Shiffin dan juga bukan hanya karena terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sejak semula Muawiyah telah memiliki dasar yang kuat sebagai landasan dalam membentuk politiknya, yaitu:

1. Dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan keluarganya.
2. Sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting.
3. Muawiyah memiliki kemampuan yang sangat menonjol sebagai negarawan sejati.³

Muawiyah dibaiat oleh umat muslim di Kufah sebagai tanda dimulainya Daulah Bani Umayyah dalam politik Islam yang berlangsung selama 90 tahun. Langkah pertama yang dilakukan Muawiyah setelah dibaiat adalah dengan memindahkan ibu kota dari Madinah al Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Sikap ini ditempuh karena ia memiliki basis rasional dan legitimasi politik yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan.

Sekalipun telah dinobatkan sebagai khalifah kekuasaan Muawiyah masih terbatas karena beberapa wilayah Islam pada waktu itu tidak mengakui kekuasaannya. Penduduk Irak mengangkat Hasan bin Ali sebagai pemimpin mereka karena Hasan bin Ali lebih berhak

³ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), 70

menggantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Tetapi karena tidak rela melihat umat Islam saling membunuh dalam merebutkan kekuasaan, tiga bulan setelah menjabat sebagai khalifah Hasan menyerahkan kekhalifannya kepada Muawiyah dengan syarat akan memberikan subsidi dan pensiun sebesar lima juta dirham dari perbendaharaan Kuffah ditambah pasukan dari distrik di Persia.⁴

Menurut Ibnu Anshari syarat-syarat Hasan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah adalah:

1. Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap seorangpun dengan penduduk Irak.
2. Menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka.
3. Pajak-pajak negeri Awaz diperuntukkan kepadanya dan diberikan setiap tahun
4. Muawiyah membayar kepadanya Husain bin Ali sebesar dua juta dirham.
5. Pemberian kepada Bani Hasyim haruslah lebih banyak dari pemberian kepada Bani Umayyah.⁵

Muawiyah adalah seorang yang telah memperkaya dirinya dengan berbagai kebijaksanaan dalam pemerintahan, dia memiliki sifat-sifat sebagai seorang penguasa, politikus dan administrator yang ulung, dia juga dikenal sebagai seorang religius dan muslim yang shalih.⁶

Sebagai seorang administrator, dia juga sangat bijaksana dalam menempatkan pembantunya pada jabatan-jabatan penting: Amru bin Ash salah seorang cendekiawan yang masyhur diangkat menjadi gubernur Mesir. Mughirah bin Su'bah seorang politikus independen diangkat menjadi gubernur di Kuffah. Keberhasilannya yang utama adalah keberhasilannya dalam menciptakan situasi yang aman dan mampu meredam gejolak penduduk Kuffah yang sebagian penduduk Ali bin Abi Thalib. Ziad adalah seorang pemimpin yang kharismatik menjabat sebagai gubernur Bashrah dengan khusus di Persia selatan.⁷

Lebih dari itu, Muawiyah adalah seorang yang berprestasi sangat bagus. Sikap dan kebijakan politiknya yang menakjubkan menunjukkan dia adalah seorang pribadi yang paripurna dan negarawan sejati. Dia memiliki sifat-sifat utama seorang pribadi yang unggul, yaitu politikus ulung, perancang militer yang brilian dan pemimpin karier yang cakap.

Berbagai pengalaman politik memperkaya dirinya sehingga menghasilkan kebijakan dan kebijaksanaan yang baik ketika

⁴ Philip K Hitti, *History Of The Arabs*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 235

⁵ *Ibid.*, 237

⁶ Karen Armstrong, *Islam Sejarah Singkat*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), 31.

⁷ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab...*, 73.

memerintah. Prinsip *The Right Man in The Right Place and The Right Man in The Right Job*, berhasil dia terapkan pada masa pemerintahannya. Sebagai contoh kecil

Selain memiliki kelebihan, Muawiyah juga memiliki kelemahan yang penulis sebut sebagai "cacat politik Muawiyah" diantaranya adalah:

1. Melakukan kudeta. Indikasinya adalah ketika dia membangun kekuatan militer untuk merongrong dan merebut kekuasaan yang syah dari tangan Ali bin Abi Thalib. Ambisinya tercapai ketika Ali bin Abi Thalib wafat dan digantikan oleh putranya Hasan. Pada saat itulah diambil alih kekuasaan dengan cara yang tidak demokratis.
2. Muawiyah membangun pencitraan dirinya dengan cara mencaci maki Ali bin Abi Thalib bukan saja dipinggir jalan bahkan ketika khutbah jum'at. Kebijakan tersebut berlangsung lama sampai seorang cendekiawan muslim yaitu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah mempunyai inisiatif untuk mengganti cacian terhadap Ali bin Abi Thalib dalam khutbah jum'at dengan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعْطِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

3. Merubah konstitusi khalifah yang berkaitan dengan pemilihan khalifah dari sistem pemilihan secara demokratis menjadi sistem monarki.

Khalifah-khalifah Bani Umayyah

Dinasti Bani Umayyah berkuasa hampir satu abad tepatnya hampir 90 tahun dengan empat belas khalifah yang dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai Marwan bin Muhammad, adapun urutannya adalah sebagai berikut:

1. Muawiyah bin Abi Sufyan (41-60 H / 661-681 M)
2. Yazid I (60-64H / 681- 684 M)
3. Muawiyah II bin Yazid (64-65 H / 684-685 M)
4. Marwan I bin al Hakam (65-66 H / 684-685 M)
5. Abdul Malik (66-86 H /685- 705 M)
6. Walid I (86-96H / 705-715 M)
7. Sulaiman (96-99 / 715-717 M)
8. Umar bin Abdul Aziz (99 H / 717 M)
9. Yazid bin Abdul Malik / Yazid II (101 105 H /720-724 M)
10. Hisyam bin Abdul Malik (105-H / 724 M)
- 11 Wahid II (125-126 H / 743-744 M)

12 Yazid bin Walid (126 H / 744 M)

13 Ibrahim bin Walid (126 H / 744 M)

14 Marwan II (126-132 H / 744-750 M).(Joesoep,1997: 13-226)

Perkembangan Politik Daulah Bani Umayyah

Sebagai khalifah atau raja pertama Dinasti Bani Umayyah, Muawiyah menawarkan sistem pemerintahan baru yang berbeda dari sebelumnya. Orang-orang Bani Umayyah telah mampu mengatasi berbagai masalah dan pertikaian yang terjadi pada masa tersebut dengan berbagai macam cara.

Perubahan yang paling menonjol pada masa Bani Umayyah terjadi pada sistem politik, *Pertama* adalah pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, keputusan ini atas dasar pertimbangan keamanan dan politis, karena letaknya jauh dari Kuffah pusat kaum Syi'ah penduduk Ali bin Abi Talib, dan juga dari Hijaz tempat tinggal Bani Hasyim dan Bani Umayyah sehingga dapat menghindari konflik antara dua Bani tersebut dalam mempertahankan kekuasaan.⁸ *Kedua* perluasan wilayah pada masa Khulafaur Rasyidin sudah sedemikian luas namun masih ada pertikaian-pertikaian dan kontak- pertempuran di daerah perbatasan.⁹ maka untuk mempermudah pertikaian militer pada zaman Bani Umayyah membentuk front-front yang mencakup tiga front.

- a. Front Romawi di Asia kecil dengan sasaran utama pengepungan ibu kota konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau tengah.
- b. Front Afrika Utara, menundukkan daerah Afrika Hitam, menyebrangi Gibraltar lalu masuk ke Spanyol
- c. Front Timur menghadapi wilayah yang amat luas sehingga operasinya dibagi menjadi dua jalur menuju utara ke daerah-daerah sungai jihun meliputi, Jihun kerajaan Tukharistan, Farghanah Kajhawairiz Farganah, Sungrun, As Shaud dan ke arah selatan dengan menyusuri Sind meliputi Pakistan dan India.(Mufrodi,1997:82). Disebelah barat menguasai Ifriqiyyah (Funisia) Al Jazair dan Maroko, menjelang akhir abad ke tujuh tercapailah pantai Samudra Atlantik wilayah selatan Spanyol yang dilakkan Thariq bin Ziyad.¹⁰

⁸ J. Suyuti, Pulungan: *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 164

⁹ Ahmad, Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993), 193

¹⁰ Abu A'la, Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1984), 171

Muawiyah mempersiapkan pasukan dalam jumlah besar lengkap dengan perbekalan dan persenjataan. Pembebasan ini dimulai dari pulau-pulau dilaut tengah dan berhasil menduduki pulau Rhojes pada tahun 53 H, pulau Kreta dan pulau Arwad pada tahun 544.

Pasukan Islam mengepung kota Konstatinopel selama 7 tahun dan tidak bisa ditaklukan bahkan Abu Ayyub Al Anshary sahabat yang masyhur dan sejumlah pasukan lainnya wafat dalam pertempuran. Demikian juga dengan khalifah Al Walid mengalami kegagalan, beberapa abad setelah itu pada masa pemerintahannya Al Fath II (Daulah Utsmaniyyah) kota Konstatinopel takluk dibawah kekuasaan Islam. Penyebab pasukan Islam menaklukan kota Konstatinopel adalah armada Bizantium menggunakan senjata canggih "wet-fire" yaitu dengan melontarkan bola-bola yang lintas pecah dan isinya berserakan lalu menyebar ke permukaan laut sehingga sebagian besar armada Islam tidak dapat meloloskan diri

Dinasti Umayyah di Damaskus mencapai kekuasaan dan kejayaan selama pemerintahan Al walid dan Al Hisyam, imperium Islam berhasil memperluas wilayah sampai batas-batas yang jauh, membentang dari pantai pulau Atlantik dan pyreness hingga ke India dan perbatasan Cina.

Kemenangan demi kemenangan yang dicapai umat Islam adalah disebabkan faktor eksternal dan internal yang menguntungkan yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Konflik internal penganut Kristen yang membasmi paham arianisme yang dianggap bid'ah oleh King Ricard sehingga terjadi kekacauan.
- b. Pemaksaan terhadap pemeluk agama yahudi dan penyiksaan dilakukan apabila tidak mau dibaptis menurut agama Kristen, yang tidak bersedia dibunuh secara brutal.
- c. Penarikan berbagai macam pajak ditengah himpitan ekonomi yang mereka alami, sementara Raja-raja Visigoshs hidup mewah dengan berbagai fasilitas.
- d. Rakyat dibagi menurut sistem kelas, sehingga keadaannya diliputi kemelaratan, ketertindasan dan ketertiadaan persamaan hak, dalam hal ini mereka mengharapkan juru pembebas dan itu mereka temukan dari orang-orang Islam.¹¹

2. Faktor Eksternal

- a. Tokoh-tokoh pejuang dan prajurit Islam sangat kuat ,penuh percaya diri, cakap, berani dan tabah dalam menghadapi segala persoalan dan

¹¹ Badri, Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 91

ajaran Islam mengajarkan toleransi, persaudaraan dan tolong menolong.

- b. Adanya kebijakan yang mengatur bahwa barang siapa yang tidak mau memeluk agama Islam maka akan dikenakan pajak jizyah sebesar satu dinar setiap tahunnya di daerah minus dan dua dinar di daerah makmur.¹²

Masa pemerintahan Bani Umayyah sangat agresif dalam usaha perluasan wilayah dan pembebasan umat manusia dari kezaliman. Dalam waktu 90 tahun, banyak bangsa di empat penjuru mata angin beramai-ramai masuk dalam kekuasaan Islam yang meliputi Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Suriah, Palestina, Iraq, Persia, Afganistan, India, Turkmenistan, Uzbekistan dan Kirgistan.

Untuk memenuhi perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks, selain mengangkat majelis penasihat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah dibantu oleh beberapa orang "al kuttab" (sekretaris), yaitu:

1. Katib al- Rasail : Administrasi dan surat menyurat
2. Katib al Kharraj : Mencatat penerimaan dan pengeluaran negara
3. Katib al Jundi : Bertugas yang berkaitan dengan ketentaraan
4. Katib al Syurtah : Pemeliharaan dan ketertiban umum
5. Katib al qudat : Bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan peradilan dan hakim.¹³

Pada masa pemerintahan Daulah Bani umayyah itu belum dikenal istilah Wazir (Minister). Sekalipun begitu istilah Al Katib (Secretary) masih terpakai didalam tatanegara-modern dewasa. Hal itu dapat dijumpai pada susunan kabinet di Inggris dan Amerika Serikat.

Keberhasilan pemerintahan Bani Umayyah yang dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan modern adalah:

1. Mendirikan Dinas Pos
2. Menertibkan Angkatan Bersenjata
3. Mencetak Mata Uang
4. Menjadi jabatan Qadhi sebagai profesi
5. Memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan.

Masa Bani Umayyah juga membentuk berbagai departemen baru antara lain bernama *Al hijabah*, yaitu urusan pengawalan keselamatan khalifah. Organisasi Syurthah (kepolisian) pada masa Bani Umayyah disempurnakan. Pada mulanya organisasi ini menjadi bagian organisasi

¹² Joesoeb Soueyb, *Sejarah Daulah Umayyah di Damaskus...*, 137

¹³ Ali Mufradi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab...*, 82

kehakiman yang bertugas melaksanakan perintah hakim dan keputusan-keputusan pengadilan, dan kepalanya sebagai pelaksana *Al Hudud*, untuk mengurus tata usaha pemerintahan. Daulah Ban Umayyah membentuk empat *Diwan* atau departemen yaitu:

1. Diwanul Kharraj (Mengurusi sumber-sumber pendapatan)
2. Diwanul Rasail (Mengurusi surat-menyurat antara pusat dan daerah yang berhubungan dengan surat negara)
3. Diwanul Khatun (Mengurusi keputusan khalifah yang dikirim ke daerah-daerah)
4. Diwanul Barid (Mengurusi informasi dari pusat ke daerah atau sebaliknya)
5. Diwanul Jundi (Mengurusi tentang militer).¹⁴

Sedangkan pada bidang pelaksanaan hukum, daulah Bani Umayyah membentuk lembaga yang bernama Nidzam Al Qadhi (organisasi kehakiman). Secara tegas khalifah melakukan sistem pemisahan kekuasaan. Terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik.¹⁵ Kekuasaan agama dan kehakiman dalam Daulah ini dibagi kedalam tiga badan yaitu:

1. *Al Qadha'* , bertugas memutuskan perkara dengan ijtihadnya, karena pada waktu itu belum ada "mazhab empat" ataupun mazhab-mazhab lainnya. Pada waktu itu para Qadhi menggali huku sendiri dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' dengan berijtihad. Badan ini bebas dari intervensi pemerintah untuk memutuskan hukum kepada pejabat dan pegawai negara yang melakukan pelanggaran.
2. *Al Hisbah / Muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat.
3. *An-Nadhar fil Madhalim*, yaitu mahkamah tertinggi atau mahkamah banding yang bertugas meninjau kembali kebenaran dan keadilan yang diputuskan oleh *Qadhi dan Muhtasib*.¹⁶

Selain dibantu beberapa Kuttab, Khalifah Bani Umayyah juga mengangkat pembantu-pembantu sebagai pendamping yang sama sekali berbeda dengan Khalifah sebelumnya. Mereka merekrut orang-orang non Muslim menjadi pejabat-pejabat dalam pemerintahan, seperti penasehat, administrator, dokter dan sesatuan dalam militer, hal ini terjadi sejak Muawiyah menjabat sebagai Khalifah, yang kemudian diwarisi oleh keturunannya. Tetapi pada zaman Umar bin Abdul Aziz kebijakan tersebut dihapus, karena orang-orang non Muslim (Yahudi,

¹⁴ J. Suyuti, *Pulungan: Fiqh Siyashah, Ajaran, sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 171

¹⁵ Harun Nasution: *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Jilid I, 82

¹⁶ A. Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan Islam.....* 172

Nasrani dan Majusi) yang memperoleh *privilage* didalam pemerintahan banyak merugikan kepentingan umat Islam.

Meskipun Muawiyah dan dinastinya telah banyak berjasa terhadap Islam, beberapa Sejarawan memandang Muawiyah sebagai seorang raja (Malik) Islam yang selalu memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya (Malik Adhudh). Salah satu dari contoh sikap Muawiyah tersebut adalah ketika Muawiyah mewajibkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, Yazid. Begitu juga ketika masa pemerintahan Yazid, dia menyerbu orang-orang yang menyatakan anti khalifah. Muawiyah dan dinastinya dipandang telah mengubah negara Islam menjadi negara yang sekular.

Perkembangan Ekonomi Daulah Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa. Setelah kehidupan menjadi stabil, dan wilayah yang semakin luas, bani Umayyah telah berhasil mencetak uang sendiri yang terjadi pada tahun 659 M pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik. Dia mengubah mata uang asing Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Mata uang tersebut terbuat dari emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai lambang kesamaan kerajaan ini dengan imperium yang ada sebelumnya dan uang yang telah dicetak ini disebarakan ke daerah-daerah kekuasaannya.¹⁷

Pada masa ini dikembangkan sistem perekonomian rakyat, dengan memerintahkan untuk menghijaukan seputar hijaz dan tandus (termasuk Mekah dan Madinah) sehingga rakyat di daerah situ tidak menggantungkan hidupnya dari meminta kepada jamaah haji.¹⁸

Dengan wilayah penaklukan yang begitu luas, maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke Dunia Islam. Penggunaan tenaga kerja ini membuat bangsa Arab hidup dari negeri taklukan dan menjadikannya kelas pemungut pajak dan sekaligus memungkinkannya mengeksploitasi negeri-negeri tersebut, seperti Mesir, Suriah, dan Irak.

Tetapi bukan hanya eksploitasi yang bersifat mengurus saja yang dilakukan oleh Bani Umayyah, tetapi ada juga usaha untuk

¹⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*..... 44

¹⁸ Ahmad, Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam III, Sejarah Islam dan Ummatnya sampai sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). 203

memakmurkan negeri taklukannya. Hal ini terlihat dari kebijakan Gubernur Irak yang saat itu dijabat oleh Al Hajjaj bin Yusuf. Dia berhasil memperbaiki saluran-saluran air sungai Eufrat dan Tigris, memajukan perdagangan dan memperbaiki sistem ukuran timbang, takaran dan keuangan.¹⁹ Jadi sumber ekonomi masa Daulah Bani Umayyah berasal dari potensi ekonomi negeri-negeri yang telah ditaklukan.²⁰

Bidang-bidang ekonomi yang terdapat pada masa Bani Umayyah dan terbukti berjaya membawa kejayaan pada rakyatnya yaitu:

1. Dalam bidang pertanian Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan sektor pertanian, beliau telah memperkenalkan sistem pengairan bagi tujuan peningkatan hasil pertanian.
2. Dalam bidang industri pembuatan khususnya kraf tangan telah menjadi nadi pertumbuhan ekonomi bagi Umayyah.

Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah

Kebesaran yang telah diraih oleh Bani Umayyah ternyata tidak mampu menahan kehancurannya akibat kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari pihak luar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran Dinasti Bani Umayyah adalah:

- 1) Pertentangan keras antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi dua kelompok yaitu Arab utara yang disebut Raudiyah yang menempati Irak dan Arab selatan (Himiyariyah) yang berdiri diwilayah Suriah. Dizamannya Umayyah persaingan antar etnis mencapai puncaknya karena para khalifah cenderung pada satupihak dan menafikan pihak yang lain.
- 2) Latar belakang terbentuknya Dinasti Bani Umayyah tidak lepas dari konflik-konflik politik. Kaum Syi'a dan Kawarij berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Bani Umayyah, disamping kuatnya kaum Abbasyiah.
- 3) Kerajaan Islam pada Bani Umayyah telah demikian luas wilayahnya sehingga susah sekali mengurus dan mengendalikan administrasi dengan baik.
- 4) Para penguasa elit pemerintahan pusat sudah terperoso pada kecintaan dunia yang menyebabkan anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan takkala mereka mewarisi

¹⁹ Mufradi, 76

²⁰ Badri Yatim, 44

kekuasaan. Disamping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang.

- 5) Penindasan terus menerus terhadap pengikut Ali pada khususnya dan terhadap Bani Hasyim pada umumnya, sehingga mereka menjadi oposisi yang kuat, kekuatan baru ini dipelopori oleh keturunan Al Abbas Ibn Abdul Muthalib dan mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan golongan Syi'ah dan kaum Mawali yang mereka dikelas-duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah, hal ini menjadi penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Dinasti Bani Umayyah.²¹
- 6) Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas, pengaturannya tidak jelas sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat dikalangan anggota istana.²²
- 7) Persaingan dikalangan anggota Dinasti Bani Umayyah untuk menjadi Putra Mahkota sehingga membawa perpecahan dan kelemahan kedudukan mereka. Perselisihan itu tidak hanya dipemerintahan pusat, tetapi juga dikalangan gubernur. Persaingan mudah timbul karena tidak adanya ketentuan tegas tentang garis yang harus ditempuh dalam pemindahan kekuasaan khalifah, apakah dari khalifah ke anaknya atau dari khalifah ke saudaranya.²³
- 8) Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non Arab, mereka adalah pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa taklukan yang mendapatkan sebutan *Mawali*. Status tersebut menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapatkan fasilitas dari penguasa Umayyah. Padahal mereka bersama-sama muslim Arab mengalami beratnya peperangan dan bahkan beberapa orang diantara mereka mendapatkan tingkatan yang jauh diatas rata-rata orang Arab. Tetapi harapan mereka untuk mendapatkan kedudukan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada Mawali itu jauh lebih kecil dibandingkan tunjangan yang dibayarkan kepada orang-orang Arab.²⁴

²¹ *Ibid.*, 48

²² Philip K Hitti, *History Off The Arabs.....* 281

²³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I* 66

²⁴ W. Montgomery, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1990). 28

Akhirnya pada tahun 132 H / 750 M khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Fustat dan terbunuh di Bussir dibawah pimpinan Shalih bin Ali yaitu paman Al Abbas. Dengan demikian berakhir masa Bani Umayyah dan berdirilah Dinasti Bani Abbasyiah.

Kesimpulan

Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pada tahun 40 H / 660 M. Muawiyah dapat menduduki kursi kekuasaan dengan berbagai cara, siasat, politik dan tipu muslihat yang licik. Jabatan raja menjadi pusaka yang turun-temurun hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya.

1. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah ibn Abi Sofyan
2. Khalifah-khalifah Bani Umayyah adalah: 1. Muawiyah bin Abi Sufyan (41-60 H / 661-681 M), 2. Yazid I (60-64H / 681- 684 M), 3. Muawiyah II (64-65 H / 684-685 M), 4. Marwan I (65-66 H / 685-686 M), 5. Abdul Malik (65-86 H /686-705 M), 6. Walid I (86-96H / 705-715 M), 7. Sulaiman (96-99 / 715-717 M), 8. Umar bin Abdul Aziz (99 H / 717 M), 9. Yazid bin Abdul Malik / Yazid II (101 105 H /720-724 M), 10. Hisham bin Abdul Malik (105-H / 724 M), 11. Wahid II (125-126 H / 743-744 M), 12. Yazid bin Walid (126 H / 744 M), 13. Ibrahim bin Walid (126 H / 744 M), 14. Marwan II (126-132 H / 744-750 M).
3. Peralihan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah dilakukan dengan tidak wajar.
4. Daulah Bani Umayyah mengalami banyak kemajuan, perkembangan dan perluasan wilayah yang gemilang, lebih-lebih dalam masa Muawiyah bin Abi Sufyan telah dicoba menguasai daerah-daerah sebelah timur sampai India dan daerah-daerah sebelah barat diarahkan ke bizantium dengan Yazid bin Muawiyah sebagai panglima besarnya.

Daftar Pustaka

- Anshari, Ibnu., 2004, *Sejarah Peradaban Islam Studi Pengantar*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press
- Amstrong, Karen., 2002, *Islam Sejarah Singkat*, (Jogyakarta, Jendela)
- Mufrodi, Ali., 1997, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta, Logos).
- Maududi, Abu A'la., 1984, *Khalifah dan Kerajaan*, (Bandung, Mizan)
- Nasution, Harun., 1985, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta:UI Press)
- Philip.K Hitti., 2005, *History Of The Arabs* (Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta)
- Pulungan, J. Suyuti., 1997, *Fiqh Siyasah, Ajaran, sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- Soueyb, Joesoeb., 1997, *Sejarah Daulah Umayyah di Damaskus*, (Jakarta, Bulan Bintang)
- Syalabi, Ahmad., 1993, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta, Pustaka Al Husna)
- Watt, Montgomery W., 1990, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana)
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003)
- Zainal Abidin, Ahmad., 1977, *Ilmu Politik Islam III, Sejarah Islam dan Ummatnya sampai Sekarang*. (Jakarta: Bulan Bintang)

**KONTRIBUSI KEBIJAKAN PIMPINAN, KOMPETENSI DOSEN
DAN PELAYANAN KARYAWAN TERHADAP PENJAMINAN
MUTU INTERNAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEPUASAN MAHASISWA**

Oleh: Iksan

(Dosen Tetap STIH Muhammadiyah Bima)

Abstract :

Assurance of internal quality can be measured seen with indicators head performance, lecturer interest and service of employees. Third of the indicator can difference minimizing between expectation with given service and storey level satisfaction of student to the third that indicator can be measured by comparing between student expectation to assurance of internal quality to which is wanted it with accepted fact. Responder at this research is taken by counted 72 student people in two college that is STIH Muhammadiyah and STAI Muhammadiyah of Bima pursuant to method of proportional sampling random stratified which is distribution by proporsional in each semester level. The result of study: (1) The head performance has a significant direct of satisfaction of students. (2) The lecturer interest has not has a significant direct of students' satisfaction (3) The service of employees have a significant direct effect of students' satisfaction. (4) The head performance, lecturer interest, service of employees and assurance of internal quality have simultan direct effect of to students' satisfaction. (5) The same as with also between head performance, lecturer interest and service of employees to have simultan direct effect of to students' satisfaction.

Keywords: *Performance, Interest, Service, Internal Quality, Satisfaction*

Pendahuluan

Banyaknya Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tidak memiliki mutu yang sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional, menyebabkan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah dalam pelaksanaan, pengelolaan maupun pengembangannya mengalami stagnasi. Hal ini menjadi kendala yang sangat sulit terutama dalam mengarungi pasar bebas dan globalisasi lebih-lebih pada persaingan antar perguruan tinggi yang semakin ketat. Adanya globalisasi dalam bidang pendidikan ini juga mengakibatkan adanya kecendrungan pengelolaan pendidikan yang mengikuti pola pengelolaan sebuah perusahaan. Sehingga, lahirlah teori baru dalam pengelolaan pendidikan yang disebut *Total Quality Education* yang diadopsi dari *Total Quality Manajemen* perusahaan. *Total Quality Education* adalah usaha suatu lembaga pendidikan untuk selalu melakukan perubahan terhadap mutu sekolah dengan mengedepankan kepuasan pelanggan atau mahasiswa sebagai indikator utama. Perubahan yang *continue* untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin maju.

Kepuasan mahasiswa adalah perasaan bahagia dan suka cita yang dirasakan mahasiswa karena penjaminan mutu internal lembaga dengan kebijakan pimpinan, kompetensi dosen dan pelayanan karyawan sebagai indikator utamanya. Kepuasan mahasiswa tidak terlepas dari kebijakan pimpinan, kompetensi dosen dan pelayanan karyawan yang diberikan lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bima di NTB.

Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk mengetahui; 1) apakah kebijakan pimpinan, kompetensi dan pelayanan karyawan serta penjaminan mutu internal berkontribusi langsung terhadap kepuasan mahasiswa? 2) apakah kebijakan pimpinan, kompetensi dan pelayanan karyawan berkontribusi langsung terhadap penjaminan mutu internal? dan 3) apakah penjaminan mutu internal berkontribusi langsung terhadap kepuasan mahasiswa?

Kepuasan adalah perihal (yang bersifat) puas; kesenangan; kelegaan. Sedangkan Mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar diperguruan tinggi (Setiawan, 2011). Kepuasan mahasiswa adalah sikap positif mahasiswa terhadap pelayanan lembaga pendidikan tinggi karena adanya kesesuaian antara harapan dari pelayanan dibandingkan dengan kenyataan yang diterimanya (Sopiatin, 2010:33).

Menurut Sugito kepuasan mahasiswa adalah suatu keadaan terpenuhinya keinginan, harapan, dan kebutuhan mahasiswa (dalam Srinadi, 2008). Sementara Sarjono (2007) Kepuasan mahasiswa adalah perbandingan antara harapan yang diinginkan mahasiswa tentang pelayanan karyawan, kompetensi dosen yang didukung oleh sarana

prasarana dan kepemimpinan dengan apa yang mahasiswa rasakan setelah mendapatkan pelayanan.

Pengertian kepuasan adalah istilah evaluatif yang menggambarkan suka dan tidak suka (Simamora dalam Winarsih, 2007:22). Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kebijakan (atau hasil) suatu produk dengan harapan-harapannya (Kotler dalam Winarsih, 2007:22).

Menurut Dikti (2010, Hal: 8) sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu perguruan tinggi diperguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Petunjuk Jaminan Mutu yang internal mempunyai kaitan dengan kebijakan dan prosedur untuk jaminan berkwalitas, persetujuan, monitoring dan tinjauan ulang program secara berkala dan penghargaan, penilaian para siswa, jaminan staff pengajar yang berkwalitas, sumber daya belajar dan dukungan siswa, sistim informasi dan informasi publik (Silman, Gokcekus and Isman, 2012).

Menurut Edward Sallis (2011: 70) mutu adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Definisi ini disebut juga dengan istilah, mutu sebagai sesuai persepsi (*quality in perception*). Mutu ini bisa disebut sebagai mutu yang hanya ada dimata orang yang melihatnya. Ini merupakan definisi yang sangat penting, sebab ada satu resiko yang yang seringkali kita abaikan dalam definisi ini, yaitu kenyataan bahwa para pelanggan yang membuat keputusan terhadap mutu. Dan mereka melakukan penilaian tersebut dengan merujuk pada produk terbaik yang bisa bertahan dalam persaingan.

Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian mutu dalam dunia pendidikan belum ditemukan format yang jelas. Tetapi ada beberapa hal menjadi patokan bahwa institusi/ sekolah memiliki mutu manakala pelanggan puas terhadap pelayanan, baik secara administrasi maupun fasilitas yang diberikan. Kedua, output yang dihasilkan lewat proses belajar mengajar dalam suatu institusi pendidikan yang dapat diandalkan dan dapat bersaing dengan institusi pendidikan lain. Dan sekolah tersebut dapat dikatakan memiliki mutu yang layak secara nasional maupun internasional.

Kata kebijakan dalam bahasa inggris dikenal dengan kata *policy*. Kebijakan, sinonim artinya dengan posisi atau pendirian; atau bagian dari kegiatan tertentu atau teguh terhadap suatu aturan. Namun, arti kebijakan bila digabungkan akan berarti panduan baik bagi mereka yang

akan melaksanakannya dan mereka yang mengamatinya (A. Pal dalam Fattah, 2012: 129)

Menurut kamus Oxford kebijakan berarti rencana kegiatan atau pernyataan tujuan-tujuan ideal (Fattah, 2012: 131). Menurut Harman kebijakan adalah spesifikasi implisit atau eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti atau harus diikuti yang terkait dengan pengenalan masalah atau masalah penting dan petunjuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Dalam Fattah 2012:135).

Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi, membimbing, melalui interaksi individu dan kelompok sebagai wujud kerjasama di organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Masaong & Tilomi, 2011:150).

Jadi, kebijakan pimpinan adalah hasil kerja yang ditunjukkan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan pemahamannya terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Kompetensi dalam pasal 1 UU tentang Guru dan Dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Dikti, 2010:90). Menurut Littrell dalam Hamzah (2008:62) kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik untuk melakukan dan keterampilan yang dipelajari melalui latihan dan praktik.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang No.14 Tahun 2005).

Dari berbagai penjelasan di atas dapatlah dikatakan bahwa kompetensi dosen adalah kemampuan individu dosen yang berkaitan dengan profesinya sebagai tenaga pengajar yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik dan sosial.

Pelayanan adalah suatu tindakan/ kebijakan penampilan yang salah satu bagian dapat ditawarkan kepada yang lain yang pada dasarnya tidak dapat dirasa dan tidak menghasilkan sesuatu apa yang dimiliki. Hal ini merupakan hasil yang tidak mungkin dihubungkan dengan hasil fisik (Kotler dalam Sarjono, 2007). Karyawan adalah Pegawai yang diangkat oleh Universitas Indonesia yang dalam kegiatannya tidak melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Majelis Wali Amanat UI, 2003). Jadi pelayanan karyawan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh karyawan perguruan

tinggi untuk memberikan *service* kepada mahasiswa sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Parasuraman dkk. (dalam Noermijati, 2010) mengatakan bahwa dalam jasa memiliki lima dimensi kualitas pelayanan yaitu; *tangible* (bukti fisik) berarti bahwa mahasiswa menghendaki adanya bukti yang dapat ditunjukkan oleh karyawan yang dapat memuaskan mahasiswa seperti hal yang menyangkut ketepatan waktu, kemudahan, keramahan, dan interaksinya dengan mahasiswa. *Reliable* (kehandalan) dalam artian karyawan yang handal dalam mengerjakan tugas-tugas yang menjadi hak mahasiswa. *Responsiveness* (daya tanggap), berarti karyawan harus memiliki daya tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan mahasiswa. Baik yang itu yang berkaitan dengan administrasi maupun hal lain yang menyangkut segala kebutuhannya. *Assurance* (jaminan) dalam artian karyawan harus memiliki pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya, bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Jaminan terhadap hal-hal tersebut akan ditunjukkan lewat interaksi mahasiswa dengan pimpinan, dosen dan karyawan dalam lingkup akademis. *Empathy* (empati) yaitu meliputi kemudahan bagi mahasiswa dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman kepada karyawan atas kebutuhan individu para mahasiswa.

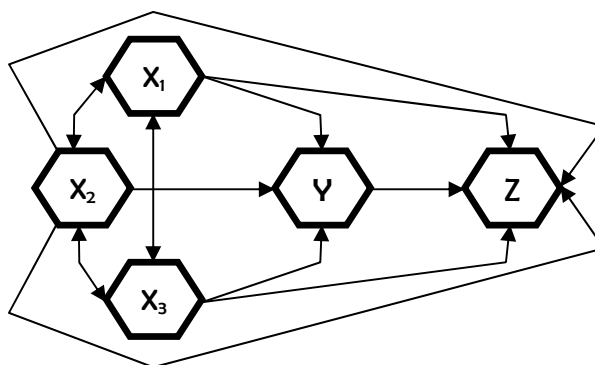
Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang kontribusi kebijakan pimpinan, kompetensi dosen, dan pelayanan karyawan terhadap penjaminan mutu internal dan apakah dampaknya terhadap kepuasan mahasiswa. Kontribusi tersebut bisa apakah terjadi secara langsung atau melalui variabel antara dalam hal ini adalah penjaminan mutu internal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan *path analysis* sebagai pisau analisisnya. Dilaksanakan pada STIH Muhammadiyah dan STAI Muhammadiyah Bima. Penelitian ini menggunakan lima instrumen penelitian yang dikembangkan dari hasil kajian teori. Instrumen tersebut dilakukan uji untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas dan di uji cobakan kepada 30 responden dengan bantuan program SPSS for windows versi 16.0.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan angket (Sugiyono, 2011: 329). Hasil uji coba angket diperoleh 7 item soal yang tidak memenuhi standar validasi yaitu 1,3 dan 15 untuk item kepuasan mahasiswa, item nomor 3 dan 8 untuk kebijakan pimpinan, item nomor 12 untuk kompetensi dosen, dan item nomor 7 untuk pelayanan karyawan. Ketujuh item tersebut tidak di hapus hanya dilakukan perubahan redaksional.

Angket disebar kepada 100 responden. Penentuan sampel berdasarkan standar minimal untuk path analisis. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa semua item angket dinyatakan valid.



Gambar 1
 Jalur Kontribusi Kausal Antar Variabel

Dengan menggunakan metode belah dua maka didapat hasil perhitungan berada diatas 0.70. dengan demikian dikatakan reliable (Sugiyono, 2011). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik inferensial-parametrik karena instrumen penelitian berupa angket dan data berupa data interval dengan memakai skala Likert (Sugiyono, 2011).

Untuk menguji hubungan variabel secara keseluruhan dengan kriteria rumusan sebagai berikut (Riduwan dkk, 2011: 136):

$$H_a: \rho_{zx1} = \rho_{zx2} = \rho_{zx3} = \rho_{xy} \neq 0$$

$$H_0: \rho_{zx1} = \rho_{zx2} = \rho_{zx3} = \rho_{xy} = 0$$

Sedangkan pengujian hubungan variabel secara individual menggunakan rumusan:

$$H_a: \rho_{zx1} / \rho_{zx2} / \rho_{zx3} / \rho_{xy} > 0$$

$$H_0: \rho_{zx1} / \rho_{zx2} / \rho_{zx3} / \rho_{xy} = 0$$

Nilai probabilitas atau taraf signifikansi yang diharapkan agar memiliki nilai kontribusi adalah lebih dari atau sama dengan 0.05 ($\text{sig} \geq 0.05$) maka Hipotesis alternatifnya (H_a) diterima, sedangkan hipotesis nuulnya (H_0) ditolak. Apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0.05 ($\text{sig} \leq 0.05$) hipotesis nuulnya (H_0) diterima.

Rumus Model-1: $Z = \rho_{zx1} X_1 + \rho_{zx2} X_2 + \rho_{zx3} X_3 + \rho_{zy} Y + \rho_z \varepsilon_1$ dan rumus untuk mencari nilai $\rho_z \varepsilon_1$ (variabel sisa) adalah $\rho_z \varepsilon_1 = 1 - R^2_{zyx1x2x3}$. Dan Rumus Model-2 $Y = \rho_{yx1} X_1 + \rho_{yx2} X_2 + \rho_{yx3} X_3 + \rho_y \varepsilon_2$ dan rumus untuk mencari nilai $\rho_y \varepsilon_2$ (variabel sisa) adalah $\rho_y \varepsilon_2 = 1 - R^2_{yx1x2x3}$

(Riduwan dkk, 2011). Perhitungan dan Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi data kepuasan mahasiswa didapat skor terendah 14 dan skor tertinggi 40 terdiri dari 15 soal angket dengan rata-rata skor angket sebesar 26,12 dengan penyimpangan sebesar 5,368. Penjaminan mutu internal diperoleh rentangan skor terendah 21 dan skor tertinggi 51 terdiri dari 16 soal angket dengan rata-rata skor angket sebesar 35,14 dengan penyimpangan sebesar 5,991. Kebijakan pimpinan diperoleh rentangan skor terendah 18 dan skor tertinggi 52 terdiri dari 10 soal angket dengan rata-rata skor angket sebesar 39,50 dengan penyimpangan sebesar 6,959. Kompetensi dosen diperoleh rentangan skor terendah 19 dan skor tertinggi 60 terdiri dari 13 soal angket dengan rata-rata skor angket sebesar 41,35 dengan penyimpangan sebesar 7,374. Pelayanan karyawan diperoleh rentangan skor terendah 11 dan skor tertinggi 38 terdiri dari 10 soal angket dengan rata-rata skor angket sebesar 26,08 dengan penyimpangan sebesar 4,702.

Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

Pertama, kebijakan pimpinan (X_1), kompetensi dosen (X_2), pelayanan karyawan (X_3), dan penjaminan mutu internal (Y) berpengaruh langsung secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa (Z) dengan nilai $R_{\text{square}} = 0.668$ dan taraf signikansi 0.000 ($0.000 < 0.05$). dengan sumbangan efektif sebesar 66,8%. Penjaminan mutu internal sebagai variabel antaranya.

Kedua, kebijakan pimpinan (X_1) berpengaruh langsung secara kausal terhadap kepuasan mahasiswa (Z) (pengujian secara parsial) dengan nilai kontribusi sebesar 0.419 dan nilai sig 0.000 ($\beta = 0.421$, $p < 0.05$) dengan sumbangan efektif sebesar 17.5% dan memiliki hubungan tidak langsung melalui penjaminan mutu internal (Y) sebesar 0.493.

Ketiga, kompetensi dosen (X_2) berpengaruh langsung secara kausal terhadap kepuasan mahasiswa (Z) (pengujian secara parsial) dengan nilai kontribusi sebesar -0.134 dan nilai sig 0.535 ($\beta = -0.134$, $p > 0.05$) dengan sumbangan efektif sebesar 2% dan memiliki hubungan tidak langsung melalui penjaminan mutu internal (Y) sebesar 0.1.

Keempat, pelayanan karyawan (X_3) berpengaruh langsung secara kausal terhadap kepuasan mahasiswa (Z) (pengujian secara parsial) dengan nilai kontribusi sebesar 0.184 dan nilai sig 0.000 ($\beta = 0.184$, $p < 0.05$) dengan sumbangan efektif sebesar 3.3% dan memiliki hubungan tidak langsung melalui penjaminan mutu internal (Y) sebesar 0.249.

Kelima, kebijakan pimpinan (X_1) mempunyai kontribusi langsung yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa dengan sig 0.000 atau $0.05 > 0.000$. Tetapi, tidak memiliki kontribusi yang tidak signifikan bila melalui jalur penjaminan mutu internal (Y) ($\text{sig} > 0.05$).

Ini berarti bahwa untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa tidak perlu melalui jalur penjaminan mutu internal (Y) tetapi harus langsung pada kebijakan pimpinan (X_1).

Keenam, kompetensi dosen (X_2) tidak mempunyai kontribusi langsung yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa (Z) dengan sig 0.534 atau $0.05 < 0.534$. Tetapi melalui jalur penjaminan mutu internal (Y) dengan sig 0.000 atau $0.05 > 0.000$. Hal ini menandakan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap kompetensi dosen harus melalui jalur variabel penjaminan mutu internal.

Ketujuh, pelayanan karyawan (X_3) tidak mempunyai kontribusi langsung yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa (Z) dengan sig 0.143 atau $0.05 < 0.143$. Tetapi melalui jalur penjaminan mutu internal (Y) dengan sig 0.000 atau $0.05 > 0.000$. Hal ini menandakan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan karyawan harus melalui jalur variabel penjaminan mutu internal.

Kedelapan, kebijakan pimpinan (X_1), kompetensi dosen (X_2), dan pelayanan karyawan (X_3), berpengaruh langsung secara simultan terhadap penjaminan mutu internal (Y) nilai $R_{\text{square}} = 0.644$ dan taraf signifikansi 0.000 ($0.000 < 0.05$). dengan sumbangan efektif sebesar 64,4%. penjaminan mutu internal sebagai variabel antara.

Kesembilan, kebijakan pimpinan (X_1) berpengaruh langsung secara kausal terhadap penjaminan mutu internal (Y) (pengujian secara parsial) dengan nilai kontribusi sebesar 0.170 dan nilai sig 0.123 ($\beta = 0.421$, $\rho < 0.05$) dengan sumbangan efektif sebesar 2.9%.

Kesepuluh, kompetensi dosen (X_2) berpengaruh langsung secara kausal terhadap penjaminan mutu internal (Y) (pengujian secara parsial) dengan nilai kontribusi sebesar 0.537 dan nilai sig 0.000 ($\beta = 0.537$, $\rho < 0.05$) dengan sumbangan efektif sebesar 28.8%.

Kesebelas, pelayanan karyawan (X_3) berpengaruh langsung secara kausal terhadap penjaminan mutu internal (Y) (pengujian secara parsial) dengan nilai kontribusi sebesar 0.156 dan nilai sig 0.222 ($\beta = 0.156$, $\rho > 0.05$) dengan sumbangan efektif sebesar 2.4%.

Keduabelas, penjaminan mutu internal (Y) berpengaruh langsung secara kausal terhadap kepuasan mahasiswa (Z) (pengujian secara parsial) dengan nilai kontribusi sebesar 0.436 dan nilai sig 0.000 ($\beta = 0.436$, $\rho > 0.05$) dengan sumbangan efektif sebesar 19%.

Secara individual uji statistik menunjukkan antara kebijakan pimpinan dengan kepuasan mahasiswa memiliki kontribusi kausal sebesar 17.5%. Hal ini didukung oleh hasil pengukuran terhadap kebijakan pimpinan rata-rata skor angket sebesar 39,50 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 39,50. Dengan

skor 38 menunjukkan skor yang paling sering muncul sedangkan hasil pengukuran terhadap kepuasan mahasiswa diperoleh rata-rata skor angket sebesar 26,12 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 26,12 dengan menunjukkan skor yang paling sering muncul (mode) adalah 30.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil yang sama. Sarjono (2007) menyatakan sumbangan efektif untuk kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan mahasiswa sebesar 1.28%. Tetapi, yang membedakan dengan hasil penelitian ini adalah tingkat signifikan. Penelitian Sarjono tidak signifikan dalam penelitian ini hasilnya signifikan.

Penelitian Derrik dkk (2010) antara komunikasi efektif terhadap kebijakan dengan tingkat signifikan 0.01. Walumbwa dkk (2011) menghasilkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kebijakan bawahan ($r=0.37$, $P < 0.01$). Duan dkk (2010) Meneliti tentang keadilan pemimpin terhadap sikap komitmen bawahan menunjukkan pengaruh yang positif ($r = 0.45$, $P= 0.001$).

Dengan demikian antara hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang sama yaitu pengaruh yang positif dan kausal antara kebijakan pimpinan dengan kepuasan mahasiswa ($\beta = 0.421$, $p<0.05$).

Secara individual uji statistik menunjukkan antara kompetensi dosen dengan kepuasan mahasiswa kontribusinya sebesar 2%. Hal ini didukung oleh hasil pengukuran terhadap kompetensi dosen diperoleh rata-rata skor angket sebesar 41,35 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 41,35. Dengan mode sebesar 42 menunjukkan skor yang paling sering muncul. Sedangkan hasil pengukuran terhadap kepuasan mahasiswa diperoleh rata-rata skor angket sebesar 26,12 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 26,12 dengan menunjukkan skor yang paling sering muncul (mode) adalah 30.

Beberapa hasil literatur penelitian menunjukkan hasil yang berpengaruh positif antara kompetensi dosen dengan kepuasan mahasiswa. Seperti yang dilakukan oleh Sarjono (2007) tentang pelayanan dosen terhadap kepuasan mahasiswa demikian juga dengan penelitian Giantari (2008) antara kepuasan mahasiswa dengan proses belajar mengajar, dan Prihantoro (2012) pelayan jasa terhadap kepuasan mahasiswa. Oleh karena itu, antara kompetensi dosen dengan kepuasan mahasiswa memiliki hubungan kausalitas ($\beta = -0.134$, $p > 0.05$).

Secara individual uji statistik menunjukkan antara pelayanan karyawan dengan kepuasan mahasiswa kontribusinya sebesar 3.2%. Hal

ini didukung oleh hasil pengukuran terhadap pelayanan karyawan diperoleh rata-rata skor angket sebesar 26,08 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 26,08. Dengan mode sebesar 29 menunjukkan skor yang paling sering muncul. Sedangkan hasil pengukuran terhadap kepuasan mahasiswa diperoleh rata-rata skor angket sebesar 26,12 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 26,12 dengan menunjukkan skor yang paling sering muncul (mode) adalah 30.

Kenyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sawyer dkk. (2009) terhadap pelayan terhadap tujuh kepribadian karyawan, dan Prihantoro (2012) antara dimensi kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan mahasiswa. Dengan begitu hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kausal antara pelayanan karyawan dengan kepuasan mahasiswa ($\beta = 0.181$, $p > 0.05$).

Secara individual uji statistik menunjukkan antara penjaminan mutu internal dengan kepuasan mahasiswa kontribusinya sebesar 19%. Hal ini didukung oleh hasil pengukuran terhadap penjaminan mutu internal diperoleh rata-rata skor angket sebesar 35,14 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 35,14. Dengan menunjukkan skor yang paling sering muncul adalah 34. Sedangkan hasil pengukuran terhadap kepuasan mahasiswa diperoleh rata-rata skor angket sebesar 26,12 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 26,12 dengan menunjukkan skor yang paling sering muncul (mode) adalah 30.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jia Hu (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa mutu layanan berpengaruh positif terhadap kesetiaan pelanggan. Dengan demikian antara penjaminan mutu internal dengan kepuasan mahasiswa memiliki hubungan kausalitas ($\beta = 0.436$, $p < 0.05$).

Mengacu pada hasil uji statistik diatas, secara simultan kebijakan pimpinan, kompetensi dosen dan pelayanan karyawan berpengaruh secara positif terhadap penjaminan mutu internal. Hasil perhitungan menunjukkan kontribusi secara bersama-sama sebesar 64.4%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Adapun hubungan kausal secara individu adalah sebagai berikut:

Secara individual uji statistik menunjukkan antara kebijakan pimpinan dengan penjaminan mutu internal kontribusinya sebesar 2.7%. Hal ini didukung oleh hasil pengukuran terhadap kebijakan pimpinan rata-rata skor angket sebesar 39,50 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 39,50. Dengan skor 38 menunjukkan skor yang paling sering muncul. Sedangkan hasil

pengukuran terhadap penjaminan mutu internal diperoleh rata-rata skor angket sebesar 35,14 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 35,14. Dengan menunjukan skor yang paling sering muncul adalah 34.

Dengan asumsi adanya keterkaitan antara beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Sarjono (2007), Derik dkk. (2010), Walumbwa dkk (2010), Chiao (2011) dan Jackson (2009). Semua penelitian tersebut mendukung hasil penelitian ini dengan hasil bahwa kebijakan pimpinan berpengaruh positif terhadap penjaminan mutu internal perguruan tinggi ($\beta = 0.170$, $\rho > 0.05$).

Secara individual uji stitistik menunjukan antara kompetensi dosen dengan penjaminan mutu internal kontribusinya sebesar 28.6%. Hal ini didukung oleh hasil pengukuran terhadap kompetensi dosen diperoleh rata-rata skor angket sebesar 41,35 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 41,35. Dengan mode sebesar 42 menunjukan skor yang paling sering muncul. Sedangkan hasil pengukuran terhadap penjaminan mutu internal diperoleh rata-rata skor angket sebesar 35,14 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 35,14. Dengan menunjukan skor yang paling sering muncul adalah 34.

Penelitian yang searah dengan dan mendukung hasil penelitian ini adalah seperti yang dilakukan oleh Noermijati (2010), Giantari dkk (2008), Prihantoro (2012) dan Sahyar (2012). Semua penelitian mereka menunjukan adanya kontribusi yang positif antara kompetensi dosen terhadap penjaminan mutu internal ($\beta = 0.537$, $\rho < 0.05$).

Secara individual uji stitistik menunjukan antara pelayanan karyawan dengan penjaminan mutu internal kontribusinya sebesar 2.6%. Hal ini didukung oleh hasil pengukuran terhadap pelayanan karyawan diperoleh rata-rata skor angket sebesar 26,08 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 26,08. Dengan mode sebesar 29 menunjukan skor yang paling sering muncul. Sedangkan hasil pengukuran terhadap penjaminan mutu internal diperoleh rata-rata skor angket sebesar 35,14 artinya rata-rata partisipasi anggota berada diatas rata-rata skor ideal yaitu 35,14. dengan menunjukan skor yang paling sering muncul adalah 34.

Penelitian yang dilakukan oleh Sawyer dkk (2009), Prihantoro (2012) dan Wibowo (2009) menjadi patokan adanya hubungan antara pelayanan karyawan terhadap penjaminan mutu internal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa antara pelayanan karyawan terhadap penjaminan mutu internal memiliki hubungan kausalitas yang positif ($\beta = 0.165$, $\rho > 0.05$).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang sudah dibahas di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pimpinan, kompetensi dosen, pelayanan karyawan dan penjaminan mutu internal secara simultan berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Secara individu antara kebijakan pimpinan dengan kepuasan mahasiswa memiliki kontribusi yang signifikan. Tetapi, kebijakan pimpinan yang melalui jalur penjaminan mutu internal tidak memiliki kontribusi yang signifikan. Ini berarti bahwa untuk memperoleh kepuasan mahasiswa harus secara langsung melalui kebijakan pimpinan. Kompetensi dosen dengan kepuasan mahasiswa berpengaruh negative artinya tidak memiliki kontribusi yang signifikan. Tetapi, berkontribusi signifikan apabila melalui jalur penjaminan mutu internal, yang menandakan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap kompetensi dosen harus melalui jalur penjaminan mutu internal. Sementara antara pelayanan karyawan dengan kepuasan mahasiswa secara langsung tidak berkontribusi signifikan. Tetapi, berkontribusi signifikan bila melalui jalur penjaminan mutu internal.
2. Secara simultan kebijakan pimpinan, kompetensi dosen dan pelayanan karyawan berkontribusi dengan signifikan terhadap penjaminan mutu internal. Kebijakan berkontribusi dengan signifikan terhadap penjaminan mutu internal. Ini berarti semakin baik kebijakan yang diberikan oleh pimpinan maka akan semakin baik mutu internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bima. Jika kebijakan pimpinan rendah maka akan rendah pula penjaminan mutu internal. Hal yang sama juga terjadi antara kompetensi dosen dengan penjaminan mutu internal. Begitupun juga dengan pelayanan karyawan terhadap penjaminan mutu internal saling berkontribusi secara signifikan.
3. Secara parsial antara penjaminan mutu internal dengan kepuasan mahasiswa berpengaruh secara positif. Ini berarti semakin baik penjaminan mutu yang dilakukan oleh lembaga dengan memaksimalkan kebijakan pimpinan, kompetensi dosen, dan pelayanan karyawan sebagai variabel independen maka akan semakin terpuaskan perasaan mahasiswa dalam menempuh perkuliahan di PTM-Bima NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Duan, Jingun, dkk 2010. *"Leadership Justice, Neagtife Organizational Behavior and Mediating Effect of Affektif Komitmen"*, Journal Social Behavior and Personality, Vol. 38, Hal. 1287-1296.
- Ebta Setiawan, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.3*, (<http://ebsoft.web.id>) di Download 07 Maret 2012, Jam 8:48:07 Wib.
- Fattah, Nanang, 2012, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Fatos Silman, Huseyin Gokcekus & Aytekin Isman, 2012, *A Study on Quality Assurance Activities in Higher Education in North Cyprus*, International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(1), 31-38.
- Kadim, Masaong & Timoli, Arfan A. 2011. *Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence: Sinergi Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual Untuk Meraih Kesuksesan yang Gemilang*, Bandung, Alfabeta.
- Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*, Jakarta.
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, *Anggaran Rumah Tangga*, Nomor: 01 /SK/MWA-UI/2003.
- Lung Chiau, Wen, dkk., 2011, *Perceptions Of The Impact Of Chief Executive Leadership Style On Organizational Performance Through Successful Enterprise Resource Planning*, Social Behavior And Personality, 2011, 39 (7), 865-878.
- Noermijati, 2010, *"Kajian Tentang Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Dosen Di Fakultas Ekonomi Unibraw"*, Journal Of Manajemen Business review, Volume 7 No. 1, Januari 2010, Hal. 33-43.

- Sallis, Edward, 2011. *Total Quality Manajemen In Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, Jakarta, IRCiSod.
- Sarjono, Yetty, 2007, *Faktor- Faktor Strategik Pelayanan Dosen dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2005-2006*, Varidika, Vol. 19, No. 1, 2007.
- Sahyar, 2009, *Pengaruh Kompetensi Dosen Dan Proses Pembelajaran Terhadap Kepuasan Mahasiswa*. Pekbis Jurnal, Vol.1, No.3, November 131-139.
- Silman, Fatos dkk, *A Study On Quality Assurance Activities In Higher Education In North Cyprus*, Internastional Online Journal of Educational Scinces, 2012 4 (1), 31-38.
- Sopiatin, Popi, 2010, *Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. 13, Bandung, Alfabeta.
- Supranto, J. 2011, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan: Untuk Menaikan Pangsa Pasar*, Jakarta, Rineke Cipta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen .
- Uno, Hamzah, 2008, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Walumbwa, Fred O. & Hartnell, Chad A., 2011, *Understanding Transformational Leadership Employee Performance Links: The Role of Relational Identification and Self-Efficacy*, Journal of Occupational and Organizational Psychology (2011), 84, Hal. 153–172.
- Webb, Kerry S. 2009, *Creating Satisfied Employees In Christian Higher Education: Research On Leadership Competencies*, Christian Higher Education, 8: Hal. 18–31.

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
MAKE A MATCH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA SISWA**

Oleh : Syarifuddin
(Dosen Tetap IAI Muhammadiyah Bima)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar Matematika dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together pada siswa Kelas VII.A semester I dengan materi Bilangan Bulat di MTs Darul Hikmah Tente Tahun Pelajaran 2014/2015. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan tes evaluasi berbentuk esai tiap akhir siklus. Ketuntasan belajar $\geq 85\%$ merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan terjadi.

Hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut: Siklus I; nilai rata-rata hasil belajar siswa 69,2 dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 72,7%. Sedangkan pada siklus II; nilai rata-rata hasil belajar siswa menjadi 74 dengan persentase ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 18,2% menjadi 90,9%. Hasil tersebut menunjukkan sudah tercapainya penelitian yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa Kelas VII.A MTs Darul Hikmah Tente pada materi Bilangan Bulat Tahun Pelajaran 2014/2015.

Kata Kunci: Kooperatif Tipe Make A Match dan Prestasi Belajar.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 pasal 3 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional yaitu berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Suparlan, 2002:155).

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan lainnya, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator pendidikan seperti ulangan harian, nilai rapor, NEM (Nilai Ebtanas Murni) belum menunjukkan peningkatan hasil belajar yang merata (Anonim, 2004:1).

Sudah bukan jamannya lagi matematika menjadi pelajaran yang menakutkan bagi siswa di sekolah. Jika selama ini matematika dianggap sebagai ilmu yang kering, teoritis, hanya berisi rumus-rumus dan tidak bersinggungan dengan realiti kehidupan siswa, kini saatnya bagi siswa untuk akrab dengan matematika, walaupun sebenarnya diantara mata pelajaran yang lain, prestasi belajar matematika saat ini relatif rendah, salah satu faktor penyebabnya adalah penyampaian materi pelajaran kurang menarik dan bervariasi sehingga siswa cenderung merasa bosan, karena dalam penyampaian materi pelajaran, guru lebih banyak menerapkan metode ceramah yang bersifat monoton dan kurang variatif, peranan guru lebih dominan dalam proses belajar mengajar mengakibatkan partisipasi, aktivitas dan motivasi siswa masih kurang. Sistem pembelajaran seperti ini cenderung untuk menghabiskan materi sesuai dengan target kurikulum. Akibatnya siswa kurang aktif dan hanya menerima apa yang diberikan oleh guru. Hal ini akan berdampak pada perilaku siswa yang kurang merasa percaya diri, baik dalam bertanya maupun penyampaian ide ataupun pendapat maupun dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi, yang akhirnya bermuara pada rendahnya prestasi belajar siswa.

Kegagalan para siswa dalam hasil belajar yang dicapainya hendak tidak dipandang sbagai kekurangan diri pada siswa semata-mata, tetapi juga bisa disebabkan oleh program pengajaran yang diberikan padanya atau kesalahan strategi dalam memilih dan menggunakan metode belajar dan alat bantu pengajaran (Sudjana, 2005:3). Adapun dalam penggunaan suatu metode hendaknya guru dapat membawa suasana interaksi pengajaran yang efekektif, menumbuhkan dan mengembangkan minat belajar dan menghidupkan proses pengajaran yang sedang berlangsung (Rohani, 2004:13).

Disinyalir dan didukung oleh beberapa hasil penelitian bahwa kebanyakan guru hanya menyampaikan bahan sesuai dengan urutan-urutan dan ruang lingkup yang ada dalam buku teks. Ini yang harus diubah, masalahnya sekarang bagaimana merubah presepsi dan pola pikiran guru terhadap tugas pokoknya mengajar, bahwa mengajar bukan semata-mata menyampaikan bahan sesuai dengan urutan buku teks, tetapi yang paling penting bagaimana memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. Sehingga semangat belajar bangkit dan terjadilah proses belajar yang tenang dan menyenangkan. Untuk kepentingan tersebut perlu dikondisikan lingkungan yang kondusif dan menantang rasa ingin tahu peserta didik, sehingga peroses pembelajaran akan berlangsung secara efektif (Mulyasa, 2007:24).

Untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, ini salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan model *cooperative learning* (CL). Model ini merupakan model kelompok yang memiliki 5 unsur dasar yang ada dalam pelaksanaanya, antara lain, saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antara anggota, dan evaluasi proses belajar (Lie, 2007: 30).

Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match*. Metode "*Make A Match*" atau mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan metode ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match* adalah : 1) mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan; 2) materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa lebih menarik perhatian; 3) mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar secara klasikal. Kekurangan *Make A Match* adalah 1) diperlukan bimbingan dari guru untuk

melakukan kegiatan; 2) waktu yang tersedia perlu dibatasi jangan sampai siswa bermain-main dalam pembelajaran; 3) guru perlu persiapan alat dan bahan yang memadai.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh apabila diterapkan strategi pembelajaran kooperatif dengan model *Make A Match* (Mencari pasangan) di MTs. Darul Hikmah Tente khususnya untuk mata pelajaran Matematika dengan judul "Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Make A Match* dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa pada Pokok Bahasan Himpunan Kelas VII.B MTs. Darul Hikmah Tente".

Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan perencanaan yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran (Aqib, 2003: 41). Berdasarkan teori tersebut aqib menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat menjadi proses memperoleh ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan kepada peserta didik.

Menurut Isjoni (2009: 14), pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik.

Ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran yaitu :

- a. Rencana adalah penataan, ketenagaan, material, dan rancangan merupakan unsur-unsur pembelajaran dalam suatu rencana khusus.
- b. Saling ketergantungan (*interppemendence*), antara unsur-unsur pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem pembelajaran.

- c. Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ciri ini yang menjadi dasar perbedaan antara sistem yang alami (natural).

Pembelajaran Matematika

Belajar adalah perubahan dalam diri manusia. Apabila tidak terjadi perubahan dalam diri manusia, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa padanya telah berlangsung proses belajar (Aqib, 2003: 43). Pendapat lain mengatakan bahwa belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah.

Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku antara yang lebih baik (positif), dalam artian belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan bukan suatu hasil atau tujuan. Pendapat lain juga mengatakan " belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya" (Slameto, 2003: 2)

Dari uraian diatas belajar adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut unsur, cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, efektif dan psikomotorik.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah mengembangkan hasil belajar siswa dalam mengenali dan memahami gejala alam dan kehidupan dalam kaitannya dengan keruangan serta mengembangkan sikap positif dan rasional dalam menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya pembelajaran matematika, sedangkan tujuan pengajaran matematika sekolah adalah agar siswa mampu memahami gejala lingkungan alam dan kehidupan di muka bumi, ciri khas satuan wilayah serta permasalahan yang dihadapi sebagai akibat adanya saling pengaruh antara manusia dan lingkungannya.

Hasil Belajar

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa:

- a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.
- b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresetasikan konsep dan lambang.
- c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri.
- d. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.
- e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut (Agus suprijono, 2009: 6).

Jadi dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasikan oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif.

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Make A Match*

Sejalan dengan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru mempunyai kebebasan dalam metode pembelajaran yang akan diterapkan. Dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bervariasi dan dapat meningkatkan peran serta siswa dalam pembelajaran. Dari sini maka harus dirancang dan dibangun suasana kelas sedemikian rupa, sehingga siswa mendapat kesempatan untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya.

Model pembelajaran kooperatif membuka peluang bagi upaya mencapai tujuan meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Dalam kelompok ini mereka bekerja tidak hanya sebagai kumpulan individual tetapi merupakan suatu tim kerja yang tangguh. Seorang anggota kelompok bergantung pada anggota kelompok lainnya. Seorang yang memiliki keunggulan tertentu akan membagi keunggulannya dengan lainnya. Di samping itu, pembelajaran kooperatif sekaligus dapat melatih siswa dan keterampilan sosial sebagai bekal dalam kehidupannya di masyarakat.

Teknik mencari pasangan (*Make A Match*), yaitu teknik yang dikembangkan Loma Curra (1994). Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Model Pembelajaran *Make A Match* artinya model pembelajaran Mencari Pasangan. Setiap siswa mendapat sebuah kartu (bisa soal atau jawaban), lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang. Suasana pembelajaran dalam model pembelajaran *Make A Match* akan riuh, tetapi sangat asik dan menyenangkan.

Langkah-langkah model pembelajaran *Make A Match* adalah sebagai berikut :

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban.
2. Setiap siswa mendapat satu buah kartu.
3. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang.
4. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Artinya siswa yang kebetulan mendapat kartu 'soal' maka harus mencari pasangan yang memegang kartu ' jawaban soal' secepat mungkin. Demikian juga sebaliknya.
5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin.
6. Kesimpulan/penutup.

Tinjauan Tentang Materi Bilangan Bulat

Bilangan Bulat

- a. Notasi Bilangan Bulat dan Posisinya pada Garis Bilangan
Salah satu contoh alat yang menggunakan bilangan bulat pada skala ukurannya adalah termometer. Jika indikator air raksa menunjukan ke angka 30° berarti besar suhu 30°C di atas nol. Jika 6°C berarti 6° di atas nol. Bilangan-bilangan di atas nol disebut *bilangan bulat positif* atau *bilangan asli*.

Dalam skala termometer Celcius, titik didih air adalah 100°C dan titik beku air adalah 0°C . Titik nol merupakan dasar atau acuan untuk menentukan titik didih

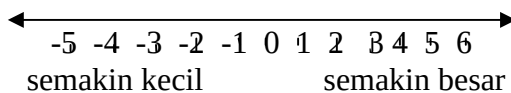
air dan titik beku air. Suhu 5°C di bawah nol ditulis -5°C , dan suhu -10°C dibaca "suhu 10°C di bawah nol". Bilangan-bilangan di bawah nol disebut *bilangan negatif* atau *bilangan bulat negatif*.

b. Hubungan Antara Dua Bilangan Bulat

Antara dua bilangan bulat dapat kita bandingkan mana yang *lebih besar*, *sama*, atau *lebih kecil*. Simbol-simbol untuk menyatakan semua itu dapat dilihat di bawah ini.

- (i) " lebih dari " ditulis $>$.
- (ii) " kurang dari " ditulis $<$.
- (iii) " kurang dari atau sama dengan " ditulis $\leq$.
- (iv) " lebih dari atau sama dengan " ditulis $\geq$.

Bagaimana cara menggunakan garis bilangan untuk membandingkan dua bilangan bulat?



Gambar 2.1 Garis Bilangan

Pada garis bilangan di atas terlihat pula bahwa:

- (i) -1 terletak di *sebelah kanan* -2 dan terletak di *sebelah kiri* 0, maka -1 terletak di antara -2 dan 0, ditulis $-2 < -1 < 0$.
- (ii) 2 terletak di *sebelah kiri* 5 dan *sebelah kanan* 1, maka 2 terletak antara 1 dan 5, ditulis: $1 < 2 < 5$.

c. Bidang Koordinat Cartesius

Bidang koordinat cartesius terbentuk dari dua buah garis bilangan yang berpotongan tegak lurus di titik (0,0). Garis bilangan pertama merupakan garis bilangan horisontal (mendatar) dan dinamakan *sumbu X*. Titik (0,0) yang merupakan titik potong kedua garis itu disebut titik pangkal (origin) dan merupakan acuan untuk menentukan pasangan titik yang lain, misalnya A(,).

pada A disebut absis titik A dan

pada A disebut ordinat titik A,

sedangkan (,) disebut koordinat titik A.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan bilangan bulat beserta operasinya untuk menjawab suatu persoalan yang ada.

b. Perkalian dan sifat-sifatnya

1. Arti perkalian

$2 \times 6 = 6 + 6 = 12$ (artinya angka 6 ada 2 buah)

$3 \times 7 = 7 + 7 + 7 = 21$ (artinya angka 7 ada 3 buah)

Dengan pola ini kita dapat menerapkan pada perkalian bilangan bulat. Misalkan untuk menjelaskan: $4 \times (-3) = \dots$? kita dapat menerapkan pola di atas.

$$4 \times (-3) = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = (-12).$$

Bagaimana dengan perkalian $(-4) \times (-3) = \dots$? kita dapat mengingat bahwa perkalian antar dua bilangan negatif menghasilkan bilangan positif sehingga hasil $(-4) \times (-3) = 12$.

Berdasarkan contoh di atas kita dapat menuliskan tanda hasil perkalian antar bilangan bulat sebagai berikut:

- c. Perkalian dua bilangan bulat dengan tanda sama adalah bilangan bulat positif.
- d. Perkalian dua bilangan bulat dengan tanda berbeda adalah bilangan bulat negatif.
- e. Perkalian sembarang bilangan bulat dengan nol adalah nol.

1. Sifat-sifat perkalian

f. Sifat tertutup

Perkalian bilangan bulat dikatakan sifat tertutup jika a dan b adalah bilangan-bilangan bulat, maka $a \times b$ adalah bilangan bulat. Dengan kata lain hasil kali dari dua bilangan bulat selalu bilangan bulat pula.

g. Sifat komutatif

Perkalian bilangan bulat dikatakan bersifat komutatif jika untuk setiap bilangan bulat a dan b maka berlaku $a \times b = b \times a$.

h. Sifat asosiatif

Perkalian bilangan bulat dikatakan bersifat asosiatif jika untuk sebarang bilangan bulat a , b , dan c maka berlaku:

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c).$$

i. Sifat distributif

Perkalian bilangan bulat dikatakan bersifat distributif jika untuk setiap bilangan bulat a , b , dan c maka berlaku: $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$.

j. Unsur identitas

Perkalian bilangan bulat memiliki unsur identitas jika untuk setiap bilangan bulat sembarang maka berlaku: $\times 1 = 1 \times =$.
 bilangan 1 dinamakan unsur identitas.

k. Sifat bilangan nol

Setiap perkalian bilangan nol dengan bilangan bulat dan sebaliknya hasilnya adalah nol. Sehingga untuk setiap sembarang akan berlaku:
 $\times 0 = 0 \times = 0$.

l. Pembagian bilangan bulat dan sifat-sifatnya

Pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. sehingga untuk setiap bilangan bulat positif dan , dengan $\neq 0$, berlaku:

1. $:$ $= +$ -, sebab $- \times =$
2. $- :$ $= -$ -, sebab $(- -) \times = -$
3. $:(-) = -$ -, sebab $(- -) \times - =$
4. $- :(-) = +$ -, sebab $- \times - = -$

• Pangkat dan Akar Bilangan Bulat

a. Makna pangkat bilangan bulat

Pangkat adalah operasi bilangan yang diperoleh dengan cara perkalian berulang untuk bilangan yang sama seperti $5^5 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$ dan $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2)$.

Jika adalah bilangan bulat dan adalah bilangan bulat maka:

$$^n = \times \times \times \dots \times$$

Sebanyak faktor

Dengan disebut pangkat atau eksponen, disebut bilangan dasar atau bilangan pokok, dan n disebut bilangan berpangkat.

b. Sifat-sifat bilangan berpangkat

2. Sifat perkalian bilangan berpangkat

Carilah hasil perkalian dari $2^3 \times 2^5$. Kita dapat menyelesaikan persoalan itu dengan definisi pangkat bilangan bulat positif, sebagai berikut:

$$2^3 \times 2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^{3+5} = 2^8$$

Berdasarkan perkalian bilangan berpangkat di atas dapat disimpulkan bahwa jika a dan b adalah bilangan-bilangan bulat positif dan x adalah bilangan real, maka;

$$a^m \times a^n = a^{m+n}.$$

3. Sifat pembagian bilangan berpangkat

Carilah hasil pembagian dari $\frac{5^9}{5^3}$. Persoalan ini dapat diselesaikan menggunakan definisi pangkat bulat positif, sebagai berikut:

$$\frac{5^9}{5^3} = \frac{5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5}{5 \times 5 \times 5} = \frac{5 \times 5 \times 5}{5 \times 5 \times 5} \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5 \times 5 =$$

$$5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^{9-3} = 5^6$$

Berdasarkan pembagian bilangan berpangkat di atas disimpulkan bahwa: jika a dan b adalah bilangan-bilangan bulat, $a \neq 0$, maka: $a^m : a^n = a^{m-n}$.

4. Sifat perpangkatan dari bilangan berpangkat

Tentukanlah nilai dari $(3^2)^4$.

Persoalan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan definisi pangkat bulat dan perkalian bilangan berpangkat bulat sebagai berikut:

$$(3^2)^4 = 3^2 \times 3^2 \times 3^2 \times 3^2 = 3^{2+2+2+2} = 3^8$$

Berdasarkan perpangkatan dari bilangan berpangkat di atas dapat disimpulkan bahwa: jika a dan b adalah bilangan-bilangan bulat positif dan x adalah bilangan real, maka $(a^m)^n$.

5. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan berpangkat

Perpangkatan dari perkalian bilangan berpangkat adalah jika a , b dan x adalah bilangan-bilangan bulat positif, sedangkan y dan z adalah bilangan real, maka: $(a^m \times b^n)^p = a^{mp} \times b^{np}$.

5. Sifat perpangkatan dari pembagian bilangan berpangkat

Definisi perpangkatan dari pembagian bilangan berpangkat adalah jika a , b dan x adalah bilangan-bilangan bulat positif (bilangan asli), dan y adalah bilangan real, dan $a \neq 0$, maka:

$$\left(\frac{a^m}{b^n}\right)^p = \frac{a^{mp}}{b^{np}}$$

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan merupakan suatu pencarian sistematis yang dilaksanakan oleh para pelaksana program dalam kegiatannya sendiri (guru), dalam mengumpulkan data tentang pelaksanaan kegiatan, keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, untuk kemudian menyusun rencana dan melakukan kegiatan –kegiatan penyempurnaan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005:140).

Penelitian ini menekankan pada kegiatan (Tindakan) dengan menguji coba suatu ide ke dalam praktek atau situasi nyata dalam skala yang mikro, yang diharapkan kegiatan tersebut mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (Yatim Riyanto, 2001:50).

Rencana Tindakan

Rencana kegiatan adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu peneliti. Dalam buku metodologi penelitian dijelaskan bahwa rencana kegiatan pada dasarnya seluruh proses pemikiran dan penentuan matang hal-hal yang dilakukan serta dapat pula dijadikan dasar penilaian baik oleh peneliti itu sendiri maupun orang lain terhadap semua langkah yang diambil (Margono S:2005). Rancangan kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah dilaksanakan dalam beberapa siklus untuk memperoleh data dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat.

Setiap siklus dilaksanakan dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat dan terdiri dari 5 (lima) tahap kegiatan yaitu :

1. Perencanaan
 - a. Menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran (RPP), dan membentuk kelompok.
 - b. Menyusun instrumen penelitian berupa soal tes, lembar observasi, dan pedoman wawancara siswa
2. Pelaksanaan Tindakan

Berdasarkan perencanaan yang disusun, peneliti melaksanakan tindakan dengan strategi pembelajaran *Make A Match* dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. Saat pelaksanaan tindakan, peneliti bertindak sebagai pengajar yang dibantu oleh dua observer.

Adapun tahapan pelaksanaan tindakan dalam kegiatan pembelajaran melalui *Make A Match*, yaitu:

- a. Mereview
Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah:

- 1) Guru mengingatkan tentang Himpunan Bilangan.
- 2) Guru berusaha memotivasi siswa.
- b. Pengembangan Konsep
Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah:
 - 1) Guru memberikan pengembangan konsep dari materi Himpunan yaitu membimbing siswa dengan cara mendiskusikan cara menaksir hasil perhitungan dari operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat.
 - 2) Guru memberi contoh soal tentang operasi hitung bilangan bulat diselesaikan.
- c. Kerja Kooperatif dan Mandiri
 6. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal soal dari kartu yang dipegang dan bagian lainnya kartu jawaban.
 7. Setiap siswa mendapat satu buah kartu.
 8. Tiap siswa memikirkan jawaban/guru soal dari kartu yang dipegang.
 9. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya (soal jawaban).
 10. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin.
 11. Kesimpulan/penutup
- d. Penugasan
 - 1) Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang baru dipelajari.
 - 2) Guru menugaskan siswa membaca materi selanjutnya di rumah.
 - 3) Guru memberi pekerjaan rumah.
3. Pengamatan (Observasi)

Selama melaksanakan tindakan diadakan observasi. Dalam observasi ini akan diamati aktivitas-aktivitas siswa dan guru yang nampak selama proses pembelajaran. Semua aktivitas siswa dan guru dicatat dalam lembar observasi yang telah disiapkan.
4. Refleksi
Pada tahap ini peneliti bertindak sebagai guru kelas dan guru kelasnya bertindak sebagai observer mengkaji kekurangan dari tindakan yang telah diberikan. Hal ini dilakukan dengan cara melihat data hasil evaluasi yang telah dicapai oleh siswa dan data observasi pada siklus sebelumnya. Dari hasil refleksi akan

didapat data-data untuk kegiatan perbaikan, yang akan dilaksanakan pada siklus sebelumnya.

Hasil Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai 15 Agustus 2014. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar matematika pokok bahasan Himpunan pada siswa kelas VII.B MTs Darul Hikmah Tente dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match* (Mencari Pasangan). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Dari hasil penelitian diperoleh data kuantitatif yang memberikan gambaran tentang ketuntasan dan hasil belajar siswa baik secara individu maupun klasik.

Penelitian tindakan kelas dimulai dengan siklus I yang terdiri dari 2 kali pertemuan dengan satu kali pertemuan untuk pembelajaran dan satu kali pertemuan untuk evaluasi setiap siklus. Adapun kegiatan siklus I terdiri dari empat kegiatan, yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan siklus I, guru akan mengetahui letak keberhasilan dan kegagalan atau hambatan yang dijumpai pada siklus I. Oleh karena itu, guru merumuskan kembali rancangan tindakan untuk siklus II. Kegiatan pada siklus ke II ini dapat berupa kegiatan sebagaimana yang dilakukan pada siklus I, tetapi sudah dilakukan perbaikan-perbaikan atau hambatan-hambatan berdasarkan hambatan atau kegagalan yang dijumpai pada siklus I (Asrori Muhammad, 2009: 103).

Hasil rata-rata prestasi belajar siswa siklus I adalah 63,75, sehingga berdampak terhadap ketuntasan belajar secara klasikal dengan persentase siklus I adalah 57,7%. Dari persentase ketuntasan belajar tersebut, belum memenuhi standar ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan, yaitu $\geq 85\%$ siswa memperoleh nilai ≥ 65 , sehingga peneliti perlu memberikan tindakan pada siklus II.

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat pelaksanaan tindakan I, dapat diketahui bahwa penggunaan metode kooperatif tipe *Make A Match* sangat mempengaruhi semangat dan keseriusan siswa dalam upaya memahami materi Himpunan yang dijelaskan. Mulai dari tahap presentasi kelas hingga kuis *Make A Match* berakhir. Hanya saja pada pelaksanaan tindakan I ini, masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan antara lain:

- 1) Pemberian motivasi dan apersepsi yang sangat kurang membuat siswa sedikit bingung dalam menerima materi dengan

menerapkan model pembelajaran *Make A Match* karena mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari.

- 2) Kerjasama antar siswa dalam mengerjakan tugas masih sangat kurang. Terlihat hanya beberapa siswa saja yang aktif mencari pasangan kartu sedangkan siswa yang lain hanya diam dan menunggu hasil pekerjaan temannya.
- 3) Sebagian besar siswa mengeluh kesulitan dalam mengerjakan soal tes akhir siklus, hal ini bukan dikarenakan soalnya yang terlalu sulit. Tetapi, memahami maksud soal saja mereka masih kesulitan, tentu saja mereka akan kesulitan untuk menyelesaikan atau mencari solusi yang tepat.
- 4) Ketika siswa diberikan soal-soal matematika, mereka tidak terbiasa berpikir tentang apa yang diketahui, apa yang dicari, bagaimana cara mencari solusi, hingga untuk menemukan jawaban yang tepat. Hal ini berakibat bahwa soal-soal matematika terkesan sangat sulit.
- 5) Kurang tepatnya peneliti dalam memperkirakan waktu yang direncanakan, sehingga pada pertemuan pertama waktu pembelajaran melebihi jam yang direncanakan yaitu sekitar 15 menit pada saat kegiatan diskusi kelompok.

Dari hasil refleksi pada siklus I ini, dapat diketahui bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan siklus I, hal ini menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan siklus I ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, kekurangan-kekurangan tersebut perlu diperbaiki pada siklus II.

Dilihat dari hasil evaluasi siklus II ini meningkat dari siklus I, dimana pada siklus II hasil rata-rata prestasi belajar siswa adalah 74,125 artinya pada siklus II meningkat 10,375. Sehingga berdampak pada ketuntasan belajar secara klasikal dengan persentase 87,5%.

Refleksi

Berdasarkan hasil observasi yang diamati pada siklus II ini menunjukkan bahwa aspek-aspek persentase keterlaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match* sudah tinggi dengan persentase kegiatan guru 88,9% dan kegiatan belajar siswa 93,75%. Hasil tes pada siklus II mencapai nilai rata-rata 74,125 dengan persentase ketuntasan belajar 87,5% siswa memperoleh nilai ≥ 65 . Persentase ini sudah memenuhi kriteria keberhasilan yang ingin dicapai yaitu 85%. Hasil tes evaluasi siklus II dapat dilihat pada lampiran 18.

Setelah melihat uraian data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran pada siklus II telah mencapai keberhasilan. Jadi penelitian telah selesai, tanpa harus diadakan tindakan selanjutnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match* pada materi Himpunan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa Kelas Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata siswa 63,75 pada siklus I dan meningkat menjadi 74,125 pada siklus II. Hal ini dapat dilihat bahwa hasil prestasi belajar siswa kelas VII.B MTs Darul Hikmah Tente mengalami peningkatan yaitu sebesar 10,375 dari siklus I ke siklus II.
2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match* pada materi Himpunan dapat menuntaskan belajar siswa secara klasikal. Hal ini dapat dilihat dari persentase ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 30% dari siklus I ke siklus II yaitu dari 57,5% menjadi 87,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rohani. 2004. *Pengolahan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
-
- Aqib, Zainal. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru*. Bandung: Yrama Widya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: rineka Cipta.
- Isjoni. 2009. *Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta Didik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
-
- Lie, Anita. 2007. *Cooperatif Learning*. Jakarta: Grasindo.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi. *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UMPRES).
- Slavin, E Robert. 2005. *Cooperatif Learning, Teori, Riset dan Praktik*. Bandung: Nusa Media.
- Soedjadi. 2000. *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sudjana. 2008. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Renama Rosdakarya.
- Sukino dan Simangunsong, Wilson. 2007. *Matematika untuk SMP Kelas VII*. Jakarta: Erlangga.
- Visman, Ahmad. 2008. *Mari Belajar Meneliti*. Yogyakarta: Gento Pres
- Wiriadmadja, Rochiati. 2005. *Metode Penelitian Tindakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

PETUNJUK PENULISAN

Jurnal Educasi Guru ini menerima tulisan dalam bentuk hasil penelitian dan artikel yang titik kajiannya pada bidang pendidikan maupun humaniora dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Hak Cipta;** Hasil penelitian dan artikel merupakan produk ilmiah orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media manapun.
2. Penulis harus mengirimkan naskah cetak beserta softcopy dalam bentuk CD kepada redaksi Jurnal; syarifpps@yahoo.co.id.
3. **Format Naskah :**Jumlah halaman tulisan antara 12 sampai dengan 20 halaman dengan ukuran kertas kuarto A4 dan spasi satu, naskah ditulis dengan *ms word times new roman*, ukuran 12 dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan di bawah 3 cm.
4. **Sistematika Artikel;** Judul, Abstrak, Isi Artikel dan Daftar Pustaka.
5. **Judul** dalam bahasa Indonesia dirumuskan secara singkat dan jelas, tidak lebih dari 15 kata, ditulis dengan huruf *times new roman 12*, huruf kapital dan di tengah.
Identitas diri: nama penulis tanpa gelar ditulis pada baris pertama, nama institusi pada baris kedua dan alamat email pada baris ke tiga. Ditulis dengan huruf *times new roman 12* spasi 1 di tengah.
6. **Abstrak;** kata abstrak ditulis dengan huruf *times new roman* dengan ukuran 12, bold, dan di tengah, naskah abstrak dalam bahasa Indonesia, dengan jumlah kata 100-200 dengan huruf *times new roman* dan ditulis miring. Jumlah *keywors* minimal 3-5 kata atau gabungan kata.
7. **Isi Artikel;** Isi artikel terdiri atas :a). Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, b). Metode penelitian yang berisi rancangan penelitian, instrumen, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. c). Hasil Penelitian, d). Pembahasan, dan e). Simpulan.
8. **Daftar Pustaka;** nama, tahun, Judul Buku, penerbit dan tempat penerbit.
Penulisan daftar pustaka: disusun berdasarkan alfabetis.